

KOMISI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

SKRIPSI

111 02 006

: Ilmu Politik


: Ilmu Politik Pemerintahan

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Makassar, 31 Mei 2007

Menyetujui

Konsultan I



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 131 961 985

Konsultan II



Drs. H.A. Yakub, M.Si
NIP. 131 907 682

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 131 961 985

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : **KONFLIK ANTARA ETNIS TIONGHOA DENGAN
MAKASSAR DITINJAU DARI PENDEKATAN
STRUKTURAL**

Nama Mahasiswa : **H A S R I A T I**

Nomor Pokok : **E 111 02 006**

Program Studi : **Ilmu Politik**


Jurusan : **Ilmu Politik Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


Makassar, 31 Mei 2007

Menyetujui

Konsultan I



Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 131 961 985

Konsultan II


Drs. H.A. Yakub, M.Si
NIP. 131 907 682

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Program Studi Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Dr. Armin Arsyad, M.Si
NIP. 131 961 985

HALAMAN PENERIMAAN

Judul : Konflik Antara Etnis Tionghoa dengan Makassar ditinjau dari Pendekatan struktural

Nama Mahasiswa : H A S R I A T I

Nomor Pokok : E 111 02 006

Program Studi : Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Politik Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Telah diperiksa dan disahkan oleh panitia ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, pada hari Senin, Tanggal 21 Mei 2007 dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

Makassar, Juni 2007

Panitia Ujian :

Ketua : Prof.Dr.H. Mappa Nasrun. MA

Sekretaris : A. Naharuddin, S.Ip,MS.i

Anggota : 1. Dr. Armin Arsyad M.Si

2. Drs. Muhammad Saad, MA

3. Drs. A. Yakub, M.Si



(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَسْتَغْفِرُكَ يَا رَبِّ وَرَوْحَةَ أَهْلِ وَرَوْحَةَ

Dengan menyebut Asma **Allah** yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji dan puja hanya kepada-Nya semata tiada 'Ilah' yang berhak dan wajib diibadahi melainkan **Dia** yang hidup kekal serta tidak mengantuk dan tidak tidur dan selalu mengurus mahluk-Nya.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita **Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam** yang merupakan teladan terbaik (uswatul hasanah) idola seluruh umat manusia dari segala macam aspek kehidupan dan yang merupakan Nabi akhir zaman yang telah dianugerahkan mukjizat yang paling agung yaitu **Al-Qur'anul Hakim** yang menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia. begitu pula kepada keluarga beliau, sahabat dan para umatnya yang senantiasa *iltizam* sampai akhir zaman.

Alhamdulillah segala puji hanya milik **Allah** Subhana Wata'ala. Kami semua memuji-Nya, memohon pertolongan-Nya, memohon Ampunan-Nya, serta bertaubat kepada-Nya. Kami berlindung kepada **Allah** dari kejahatan diri dan perbuatan buruk kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh **Allah** maka tidak ada yang dapat menyesatkannya dan barang siapa pula yang disesatkan oleh **Allah** maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. (*Na'udzu billahi min dzalik*) .harapan penulis semoga kita semua menjadi hamba **Allah** yang selalu mendapatkan petunjuk-Nya. Amien.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Terima kasih yang tak terhingga buat kedua orang tua penulis yang tercinta Ibunda **Aisyah** dan Ayahanda **Husaini** atas kasih sayangnya, serta pengorbanan yang tulus, semoga kelak kubisa mengikuti jejak kesabarannya . Buat Adikku tersayang **Hariyani**, tank's atas pengertiannya. Maaf ya klu kaka' selalu merepotkan, kaka' bangga punya Adik seperti kamu, bangga terlahir di keluarga kita. Terima kasih pula buat keluarga yang selalu

mensupport dan mendoakan penulis. Semoga *Allah Azza Wa Jalla* mengumpulkan kita kelak di *Jannatul Firdausil A'laa*.

2. Bapak **H.A. Muhammad Rum** beserta keluarga atas bantuan moril dan materinya. *Jazakumullah khair*.
3. Bapak **Dr. Armin Arsyad, M.Si** dan Bapak **Drs. A. Yakub, M.Si** selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya dan memberikan bimbingan dan moril kepada penulis hingga selesainya penulisan skripsi ini.
4. Seluruh staf dosen dan pegawai jurusan Politik Pemerintahan, fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
5. Sahabat seperjuanganku *SunSad Cruw, Arra, yuyun* “moga impiannya segera terwujud”, **Ria** “cepat sembuh de”, **Andis, Ade. Cicci, Dona, Ka Tamir, Genta’ Iswan**. Makasih kebersamaannya, tetap kompak ya.
6. Terkhusus buat sahabatku **Rina** dan **Yuyun**, *Ukhibuki Fillah* jarak bukanlah suatu penghalang untuk kita tetap bersua. Semoga kita tetap berada dalam keimanan dan keistiqamahan.
7. Teman-teman di PEMDA Barru khususnya dibagian umum, Bapak **H. Ishak, ka Darma, ka Ani, Ibu Tina, Ibu Hasna, Hj.Ila, Hj. Diah, Sugi, ka Ode** dll
8. Teman-teman seperjuangan KKN, **Desy, Andy dan Aswar**, Makasih atas pembelajarannya.
9. Buat **K’ Antho, K’ Jack** serta serta semua rekan-rekan yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman angkatan politik 02 solidarity for struggle, terkhusus buat **Eky** yang telah banyak membantu Skripsi penulis. Buat **Athi** sang motifator “I miss U sobat semoga kelak kita dipertemukan kembali. **Arra**, sahabatku yang pengertian. **Risna** “musuh bebuyutan yang selalu dirindukan”. **Fhio, Asri, Ida, Rini, Sasty, Ita, rina, narti** dll. Kapan reuninya?.....

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya, maka dari itu penulis sangat berharap masukan saran dan kritik dari semua pihak yang sifatnya membangun.

Walaikummussalam Warahmatullahi Wabarakatu

Makassar, Juni 2007

Penulis

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
ABSTRAK.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pendekatan Struktural.....	7
B. Konsep Konflik Etnis.....	8
C. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	12
D. Penyelesaian Konflik.....	20
E. Konsep Identitas.....	26
F. Eksistensi Etnis Tionghoa di Indonesia.....	29
G. Kerangka Pemikiran.....	31
H. Model Analisis.....	33
I. Defenisi Operasional.....	34
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	35
B. Tipe dan Dasar Penelitian.....	35

C. Jenis Data.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknis Analisis Data.....	37
 BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Kota Makassar.....	38
B. Etnis Makassar.....	46
C. Etnis Tionghoa di Makassar.....	51
 BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Konflik Etnis	
1. Koflik Individu.....	53
2. Konflik Kelompok.....	56
B. Faktor-faktor Pemicu Konflik Etnis	
1. Ekonomi.....	60
2. Perbedaan Etnis.....	63
3. Agama.....	68
4. Budaya.....	69
C. Mengelolah Konflik Fungsional Pada Tingkat Individu Dan Kelompok.....	73
 BAB VI. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	78
 DAFTAR PUSTAKA.....	 79

DAFTAR TABEL

TABEL	HALAMAN
Tabel 4.1 Luas wilayah persentase dan luas wilayah menurut kecamatan di kota Makassar	41
Tabel 4.2 Jumlah desa / kelurahan menurut kecamatan di kota Makassar	42
Tabel 4.3 Banyaknya anggota DPRD kota Makassar menurut Fraksi dan jenis kelamin	43
Tabel 4.4 Banyaknya anggota DPRD kota Makassar menurut Komisi dan Jenis kelamin.....	43
Tabel 4.5 Distribusi warga keturunan Etnis Tionghoa kota Makassar dirinci Menurut Kecamatan.....	45

ABSTRAK

HASRIATI, (E 111 02 006), "Konflik Antara Etnis Tionghoa dengan Makassar Ditinjau Dari Pendekatan Struktural". Dibawah bimbingan Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si, sebagai konsultan I dan Drs.H.A.Yakub, M.Si, sebagai konsultan II.

Latar belakang utama penelitian ini adalah adanya masalah-masalah politik yang terjadi dalam masyarakat khususnya pada etnis keturunan Tionghoa.

Dalam penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana pengelolaan konflik antara etnis menjadi konflik fungsional dan apakah faktor-faktor ekonomi, etnis agama dan budaya merupakan pemicu konflik etnis

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan konflik yang sering terjadi antara etnis Tionghoa dengan etnis Makassar dan faktor-faktor terjadinya konflik.

Dasar penelitian ini adalah dengan menggunakan studi kasus, yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada beberapa individu atau kelompok dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan tokoh etnis Tionghoa Makassar dan pengamatan terhadap kondisi di lapangan serta menggunakan sumber-sumber literatur mengenai politik etnis khususnya etnis Tionghoa berupa buku-buku, majalah, surat-kabar dan informan tertulis.

Kesimpulan yang diperoleh penulis dari hasil penelitian adalah Konflik antar etnis yang terjadi di Makassar terdapat 2 aspek. Pertama Konflik individu yang berawal dari pertikaian individu antara warga Tionghoa dengan warga Makassar. Kedua, konflik kelompok muncul akibat menguatnya solidaritas kelompok sebagai akibat tekanan atau ancaman untuk membela diri dan terlibat konflik dengan lawan konflik. Munculnya konflik kelompok berawal dari konflik individu yang terjadi sebelumnya. Adapun faktor pemicu konflik antara etnis di Makassar ada 3 yakni, perbedaan ekonomi, etnis, dan budaya. Faktor yang dominan adalah etnis, sentimen etnis mudah mengalami konflik antara etnis Makassar dan Tionghoa di Makassar. Sedangkan agama berperan sebagai peredam konflik. Untuk pengelolaan konflik etnis menjadi konflik fungsional, dimana konflik tidak selamanya berarti negatif atau disasosiatif. Konflik bisa menjadi kekuatan pemersatu dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang memiliki keberagaman suku dan etnis. Suatu hal yang menjadikan bangsa ini kaya akan keberagaman budaya. Apalagi bila ditunjang dengan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika. Bila kedua hal ini dipadukan, maka gambaran yang muncul yakni sebuah negara yang kuat dengan penduduknya yang hidup damai berdampingan dengan mengesampingkan perbedaan. Namun masalah rawan yang merupakan konsekuensi dari kebhinekaan tersebut adalah konflik yang bersifat SARA (Suku bangsa, Agama, Ras dan Antar golongan).

Disadari atau tidak, posisi warga keturunan Tionghoa dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara masih menyimpan sejumlah persoalan. Di sana-sini masih sering terlontar rasa ketidaksukaan yang diarahkan kepada warga keturunan meskipun tidak dalam jumlah yang bersifat menyeluruh. Demikian halnya dengan predikat-predikat yang menandai adanya karakter dan sifat anggota komunitas keturunan ini. Tidak jarang mereka dipandang sebagai *homo economicus* yang tidak peduli terhadap lingkungan dimana mereka berada.

Loyalitas dan rasa kebangsaan mereka terhadap negara masih sering dipermasalahkan. Walau kebanyakan tidak lagi memiliki hubungan langsung dengan negeri leluhur (Cina daratan), mereka masih sering dianggap sebagai "*orang asing*" dan bukan bagian integral dari masyarakat Indonesia. Kesamaan tempat lahir, praktik

budaya, bahasa, atau status kependudukan belum mampu menghapus kesan bahwa mereka adalah komunitas pendatang. Berbeda halnya dengan Komunitas Arab. Meskipun sama-sama merupakan warga keturunan asing, mereka relatif lebih dapat diterima sebagai bagian dari bangsa Indonesia, paling tidak, jika diletakkan dalam konteks integrasi atau pembauran politik dan sosial budaya. Percepatan pembauran dikarenakan adanya faktor kesamaan agama yang dianut.

Pandangan seperti ini tidak sehat dan kurang menguntungkan. Hal itu berlaku bagi warga keturunan maupun masyarakat Indonesia yang lain. Dalam situasi-situasi tertentu, perbedaan yang dimiliki oleh dua komunitas tersebut terasa lebih tajam, dan sering dijadikan alasan untuk mengembangkan rasa kecurigaan dan tuduhan.

Ketika masyarakat pribumi tidak puas terhadap situasi yang ada, komunitas keturunan dapat dengan mudah menjadi sasaran kecurigaan dan sebagainya. Sebaliknya, tuntutan keadilan ekonomi yang datang dari rakyat kecil sering ditanggapi secara dingin oleh sebagian warga keturunan yang dari segi materi memang sangat berlimpah.

Pada umumnya etnis Tionghoa di kota Makassar berperan dibidang ekonomi, termasuk sektor perdagangan. Asumsi ini bersamaan dengan adanya anggapan bahwa masyarakat etnis Cina mendominasi bidang itu, yang telah diperkuat

oleh *Victor Purcell* yang menyatakan bahwa dari keseluruhan pekerja Cina di Indonesia, pedagang merupakan kelompok terbesar.¹

Anggapan dasar itu akan semakin jelas bila dipadukan dengan hasil pengamatan yang dilakukan sehari-hari terhadap kota-kota di seluruh Indonesia, terutama kota Makassar dimana mayoritas mereka bekerja sebagai pedagang. Kenyataan seperti itu seakan-akan tidak pernah meyakinkan banyak pihak bahwa masyarakat etnis Cina banyak menjadi petani atau kuli kontrak perkebunan.

Dari hasil wawancara salah satu warga keturunan Tionghoa Pak Hok, yang juga menjabat sebagai *Penasehat Hubungan perdagangan antara Indonesia dengan Tiongkok*, menyatakan bahwa jumlah etnis Tionghoa yang tinggal di Makassar kurang lebih satu juta orang. Sebagian besar bekerja sebagai pedagang dan mereka terbagi atas tiga bagian. *Pertama*, pedagang kecil, dimana usaha mereka sulit berkembang, jumlah mereka sekitar 35%. *Kedua*, pedagang menengah, mereka sudah mampu mengembangkan usahanya. Jumlah mereka sekitar 25%. Dan *ketiga*, Pedagang kelas atas, dimana usaha mereka sudah terjaring sampai keluar negeri. Jumlahnya sekitar 5%. Selain itu berkisar 30% warga keturunan Tionghoa bekerja sebagai pegawai di Perusahaan swasta. Sekitar 5% lagi warga Tionghoa menggeluti pekerjaan lainnya.

Berbicara tentang etnis Tionghoa di Makassar. Diawal kedatangan orang Tionghoa di Indonesia sejak ratusan atau boleh jadi ribuan tahun yang lalu. Interaksi sosial antara pribumi dengan etnis Tionghoa berlangsung secara harmonis. Akan

¹ Purcell. (dalam Tangdililing). Jurnal ilmu politik. 1990. hal. 42

tetapi setelah pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan politik *divide et imperal* dengan cara membagi penduduk kedalam strata sosial yang berbeda yaitu lapisan atas yang terdiri atas golongan Eropa, ditengah ditempati golongan timur asing (Arab,India,dan Tionghoa) dan lapisan paling bawah terdapat golongan pribumi (Inlander),maka hubungan sosial antara pribumi dengan orang Tionghoa manjadi terganggu sebab komunitas ini hidup secara terpisah dalam kantong-kantong pemukiman lingkungan masing-masing dan dengan pelakuan sistem hukum berbeda.

Dalam konteks hubungan antara masyarakat Tionghoa dengan etnis Makassar, salah satu masalah yang sering kali muncul dan bahkan fenomena ini sudah membudaya ditengah masyarakat adalah adanya stereotip (kesan terhadap suatu etnis, ras atau budaya masyarakat lain) ini kerap lain ditemui baik dalam lingkungan keluarga maupun kelompok sepermainan dan diikuti oleh adanya prasangka negatif sehingga terbuka ruang yang lebih luas bagi tumbuh suburnya bibit disitegrasi antara etnis.

Proses pembauran yang belum maksimal, konflik horizontal kerap terjadi di kota Makassar. Ketegangan akibat isu SARA yang terjadi di Makassar pada bulan Mei 2006 mengedam keprihatinan dari berbagai kalangan pasalnya dapat merusak citra Indonesia dan Makassar dimata Internasional. Situasi itu dipicu akibat kematian Hasniati (20) salah PRT, diduga dianiaya majikannya, Wandu Tandawan (24) warga Jl. gunung latimojong. A no 8 persoalan ini menjadi pemicu massa dari etnis Makassar aksi mereka sempat melimpihkan ruas jalan yang ada di kota Makassar. Massa membrutal dengan melempar toko-toko milik warga Tionghoa. Dari hasil

pertemuan tokoh antara dua etnis disepakati agar kasus ini ditangani pemerintah dan aparat keamanan untuk diselesaikan.

Melihat fenomena diatas, sebagai mahasiswa Ilmu Politik, maka dirasakan perlu untuk mengkaji akan masalah-masalah politik dalam masyarakat khususnya pada etnis keturunan Tionghoa. Dengan didasari atas pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik utama yang dibahas adalah konflik etnis Tionghoa Makassar ditinjau dari pendekatan struktural di kota Makassar, termasuk didalamnya menelusuri secara ilmiah individu dan kelompok organisasi Tionghoa yang ada di kota Makassar.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengemukakan judul yang mengacu pada beberapa permasalahan “ **Konflik Etnis Tionghoa Makassar Ditinjau Dari Pendekatan Stuktural Di Kota Makassar** ” dengan mencoba mengkaji masalah ini untuk gambaran yang lebih jelas, yaitu:

1. Bagaimana mengelola konflik antara etnis menjadi konflik fungsional ?
2. Apakah faktor-faktor ekonomi, etnis agama dan budaya merupakan pemicu konflik etnis ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan utama penelitian ini adalah untuk menggambarkan konflik yang sering terjadi antara etnis Tionghoa dengan etnis Makassar dan faktor-faktor terjadinya konflik.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

1. Manfaat akademik dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu politik pada khususnya yakni digunakan sebagai informasi bahan perbandingan dalam analisis politik etnis Tionghoa ditinjau dari pendekatan struktural serta diharapkan memberikan sumbangsih pemikiran dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa ditempat lain.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi diri pribadi penulis, akademisi dan pemerintah daerah khususnya dalam wilayah politik praktis yang terjadi agar menjadi sebuah pencerahan yang baru dalam dinamika politik .

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka sangat penting untuk lebih memperjelas dan mempertegas dari aspek teoritis. Literatur-literatur yang berisi pendapat para ahli, maupun website banyak digunakan untuk menyempurnakan penelitian ini.

Sehubungan pembahasan sebelumnya, maka bab II ini lebih memperjelas dari aspek teoritis. Secara konseptual akan dijelaskan beberapa pengertian yang disertai dengan pendapat dari para ahli yang memiliki hubungan dengan pokok bahasan serta hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian yang meliputi pengertian konflik etnis, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik, penyelesaian konflik, dan eksistensi etnis Tionghoa di Makassar.

A. PENDEKATAN STRUKTURAL

Dalam kajian pendekatan struktural yang dikemukakan oleh *Smelser*² bahwa proses dalam kajian psikologi sosial setiap tahap didalam proses penambahan nilai merupakan kondisi yang dibutuhkan untuk menambah apropriasi dan efektivitas nilai pada tahap berikutnya. Kondisi yang dianggap mencukupi adalah kombinasi semua kondisi yang dibutuhkan menurut pola defenitif tertentu.

1. Kondusivitas struktural yaitu karakteristik-karakteristik tata letak tempat aksi social berlangsung yang mendukung jenis prilaku kolektif tertentu, tetapi tidak mendukung jenis kolektif lainnya.

² Smalser. Protes Dalam Kajian Psikologi Sosial. Hal 367

2. Ketegangan struktural, mengacu pada "sesuatu yang salah didalam lingkungan masyarakat" contoh konsep adalah integrasi inkonsistensi deprivasi dan anomie.
3. Perkembangan dan penyebaran keyakinan yang tergeneralisasi ; keyakinan yang tergeneralisasi mengidentifikasi sumber ketegangan, mengatribusikan karakteristik-karakteristik sumber ketegangan itu. Kemudian sedapat mungkin dan setepat mungkin menentukan respon-respon tertentu terhadap ketegangan itu.
4. Faktor-faktor pencetus ; kejadian pencetus, misalnya penahanan atau pembunuhan oleh oknum polisi yang membangkitkan reaksi banyak pihak.
5. Mobilisasi peserta untuk melakukan aksi sebagai kondisi yang diperhitungkan untuk membawa kelompok yang terkena pengaruh kedalam aksi. Menurut Smelser prilaku pemimpin sangat penting saat ini.
6. Berlakunya control sosial ; yaitu proses-proses yang berjalan baik di semua tahap untuk mengurungkan dan mengendalikan prilaku kolektif sebelum dan sesudah hal itu terjadi.

B . KONSEP KONFLIK ETNIS

Untuk mendapat kejelasan tentang pengertian konflik etnis maka dapat diartikan melalui asal katanya yakni konflik dan etnis. Untuk memperoleh pengertian yang jelas, maka penulis mengemukakan secara definisi mengenai pengertian konflik dan etnis, yaitu:

Konflik dalam pengertian *Kamus Politik B.N Marbun,SH* adalah perwujudan dan/atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak, yang dapat merupakan dua orang atau bahkan golongan besar seperti negara. Kadang-kadang konflik

digunakan juga untuk menyambut pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang (psikologis); percekocokan; bentrokan.³

Konflik menurut *Santoso* (1990:32) adalah suatu bentuk interaksi sosial dimana seseorang individu/kelompok dalam mencapai tujuan, maka individu/kelompok yang lainnya akan mengalami kehancuran, sedang yang lain menilai bahwa konflik merupakan sebuah proses sosial dimana individu-individu atau kelompok individu berusaha memenuhi tujuan dengan jalan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan.⁴

Sedangkan perspektif teori konflik adalah cara pandang yang melihat masyarakat sebagai arena konflik antar kelompok, dan antar kelas sosial yang berlangsung secara terus-menerus serta cenderung menimbulkan pertentangan, ketegangan dan perubahan.

Dalam teori "*Sosiologi modern*" *Dahrendorf* mengemukakan bahwa masyarakat mempunyai dua wajah (konflik dan konsensus) dan karena itu teori sosiologi harus dibagi menjadi dua bagian : teori konflik dan teori konsensus. Teoritis konsensus harus menguji nilai integrasi dalam masyarakat dan teoritis konflik harus menguji konflik kepentingan dan penggunaan kekerasan yang mengikat masyarakat bersama di hadapan tekanan itu. Diakui bahwa masyarakat takkan ada tanpa konsensus dan konflik yang menjadi persyaratan satu sama lain. Jadi, kita tak akan punya konflik kecuali ada konsensus sebelumnya.⁵

³ Marbun. Kamus Politik. 2005. Hal 32

⁴ Santoso. Dinamika Kelompok. 1999. Hal 32

⁵ Dahrendorf. Sosiologi Modern. Hal 153

Untuk tujuan analisis sosiolog tentang kelompok konflik dan konflik kelompok, perlu menganut orientasi struktural dari tindakan pemegangan posisi tertentu. Dengan analogi terhadap orientasi kesadaran (subjektif), tampaknya dapat dibenarkan mendeskripsikan ini sebagai kepentingan. Asumsi kepentingan "objektif" yang di asosiasikan dengan posisi sosial tidak mengandung ramifikasi atau *implikasi psikologis*; ia termasuk dalam level analisis sosiologis.⁶

Konsep etnis didefinisikan sebagai sejumlah orang yang memiliki persamaan ras dan warisan budaya yang membedakan mereka dengan kelompok lainnya. Sedangkan kelompok etnik adalah kelompok yang para anggotanya memiliki kedudukan sosial dan latar belakang etnik yang sama.

Menurut *Jack. c. Plano* Masyarakat etnis merupakan suatu kumpulan orang-orang yang mempunyai sifat yang sama yang membedakannya sebagai suatu kelompok dan yang berinteraksi satu sama lain dalam suatu cara yang khas. Umumnya masyarakat etnis mengacu pada kelompok yang mempunyai kebudayaan langsung dan hidup sebagai suatu kesatuan yang dapat dibedakan. Dalam karya sosiologi, suatu masyarakat etnis dianggap sebagai suatu sistem sosial yang memberikan orientasi pokok kepada rakyat yang ada di dalam suatu kawasan tertentu, mengerahkan anggota melalui pengembangbiakan dan mempertahankan jarak kehidupannya dengan anggota perseorangannya. Dalam praktek, batas-batas masyarakat cenderung dibatasi sedemikian rupa sesuai dengan garis-garis politiknya,

⁶ Ibid. Hal 175

sehingga suatu masyarakat mungkin bisa diartikan sebagai masyarakat nasional, yaitu rakyat yang terlingkup dalam suatu sistem politik yang berdaulat.⁷

Para ahli sosiologi menggunakan istilah *kelompok etnik* untuk menyebutkan setiap bentuk kelompok baik kelompok ras maupun yang bukan kelompok ras yang secara sosial dianggap berada dan telah mengembangkan subkulturnya sendiri. Dengan kata lain, suatu kelompok adalah kelompok yang diakui oleh masyarakat dan oleh kelompok etnik itu sendiri sebagai suatu kelompok yang tersendiri.

Walaupun perbedaan kelompok yang tersendiri dikaitkan dengan nenek moyang tertentu, namun ciri-ciri pengenalnya dapat berupa bahasa, agama, wilayah kediaman, kebangsaan, bentuk fisik, atau gabungan dari beberapa ciri tersebut. Istilah tersebut sangat tepat digunakan bilamana beberapa perbedaan kelompok dianggap cukup penting, sehingga dapat dipakai untuk memisahkan suatu kelompok tertentu dari kelompok lainnya.

Jika orang ditugaskan pada beberapa kelompok etnik yang berbeda, maka akan terjadi kecenderungan untuk melakukan penilaian stereotip (prasangka) dan memperlakukan mereka berdasarkan pertimbangan diskriminasi. Dalam segi hubungan antar kelompok etnik, diskriminasi merupakan cara memperlakukan orang berdasarkan pada klasifikasi kelompok, bukannya berdasarkan ciri-ciri individu.

Berdasarkan uraian kalimat diatas dapat disimpulkan bahwa konflik etnis adalah pertentangan yang terjadi antar kelompok individu dengan tujuan menentang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan guna mencapai tujuan masing-masing.

⁷Plano. Kamus Analisa Politik. 1985. Hal 243

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KONFLIK

Penyebab konflik pada dasarnya dapat dibagi dua yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal :

1. Yang dimaksud dengan kemajemukan ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultur, seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras ; dan majemuk secara sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi, seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri, militer, wartawan, alim ulama, supir, dan cendekiawan.

Kemajemukan horizontal-kultur menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultur tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, dan masing-masing penghayat budaya tersebut ingin mempertahankan karakteristik budayanya. Dalam masyarakat seperti ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik yang terjadi dapat menimbulkan perang saudara dan gerakan separatisme. Kalau hal ini terjadi, maka masyarakat tersebut akan mengalami disintegrasi yang fatal.

Kemajemukan horizontal-sosial menimbulkan konflik, karena masing-masing kelompok masyarakat tersebut mempunyai kepentingan yang berbeda-beda bahkan saling bertentangan.

2. Sedangkan yang dimaksud dengan kemajemukan secara vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik, karena adanya sekelompok

kecil sebagian besar tidak atau kurang memiliki kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan.

Polarisasi masyarakat seperti ini merupakan benih subur untuk timbulnya konflik politik. Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan vertikal ini akan semakin luas dan mendalam apabila sekelompok kecil masyarakat itu mendominasi ketiga sumber kekuasaan itu sekaligus.⁸

Menurut *Maurice Duverger* dan *Maswadi Rauf*, bahwa penyebab-penyebab terjadinya konflik adalah :

1. Sebab-sebab individual. Sebab-sebab individual seperti kecenderungan berkompentensi atau selalu tidak puas terhadap pekerjaan orang lain dapat menyebabkan orang yang mempunyai ciri-ciri seperti selalu terlibat konflik dengan orang lain pun ia berada.
2. Sebab-sebab kelompok adalah penyebab konflik yang oleh kelompok sebagai hasil dari interaksi sosial antara anggota-anggota kelompok. Penyebab konflik ini dihasilkan oleh adanya tantangan dan masalah yang berasal dari luar yang dianggap mengancam kelompok. Adanya tekanan dari pihak lain yang membuat sebuah kelompok terancam untuk membela diri dan terlibat konflik dengan konflik yang menekan. Disamping itu, sebab kolektif ini juga yang dapat berupa munculnya keinginan dari anggota-anggota kelompok untuk memajukan kelompok dan memperbaiki posisi kelompok itu di dalam masyarakat. Keinginan itu tentu saja akan menimbulkan reaksi dari kelompok lain yang terkena atau

⁸ Nasikan. Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia. 1974. Hal 30

terganggu oleh keinginan kelompok tersebut sehingga menimbulkan konflik kelompok.⁹

Penyebab konflik pada tingkat kolektif ini didorong oleh semakin menguatnya solidaritas kelompok sebagai akibat tekanan atau ancaman dari luar dan keinginan-keinginan perubahan yang muncul di dalam kelompok. Keyakinan akan kebenaran jalan yang ditempuh oleh kelompok akan memperkuat integrasi kelompok yang pada gilirannya akan memperkuat kedudukan kelompok tersebut dalam berkonflik dengan kelompok lainnya.

Menurut *Maswadi Rauf* Konflik juga terjadi karena adanya keinginan manusia untuk menguasai sumber-sumber dan posisi yang langka. Uang, umpamanya, bersifat langka namun amat dibutuhkan untuk bisa hidup di dunia ini. Kebutuhan manusia amat banyak dan tidak pernah akan terpenuhi semuanya. Hal inilah, antara lain, yang menyebabkan adanya kelangkaan tersebut adalah sifat-sifat kehidupan di dunia ini. Konflik terjadi adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota masyarakat untuk memperebutkan barang-barang pemenuh kebutuhan yang terbatas tersebut. Sama halnya dengan sumber-sumber, posisi atau kedudukan atau jabatan juga langka dalam masyarakat. Kedudukan sebagai penguasa negara, umpamanya, merupakan bahan rebutan di antara anggota-anggota masyarakat yang menghasilkan konflik.¹⁰

⁹ Maswadi Rauf. *Konsensus Dan Konflik Politik*. 2001. Hal 49

¹⁰ *Ibid.* hal 6

Kecenderungan manusia untuk menguasai orang lain merupakan penyebab lainnya dari konflik. Hal ini berarti kecenderungan manusia untuk berkuasa menjadi salah satu penyebab konflik. Manusia selalu menginginkan orang lain menganut apa yang dianutnya karena ia berpendapat bahwa apa yang dianutnya adalah yang terbaik bagi semua orang, disamping alasan keinginan untuk mendominasi. Oleh karena itu kecenderungan manusia untuk menarik orang lain agar menganut ideologi atau agama yang dianutnya merupakan salah satu sumber konflik terpenting dalam masyarakat.

Faktor penyebab timbulnya konflik pertentangan menurut *Soekanto* antara lain :

1. Perbedaan antara individu-individu.

Perbedaan pendirian dan perasaan mungkin melahirkan bentrokan antara mereka.

2. Perbedaan kebudayaan.

Perbedaan kepribadian dan orang perorangan tergantung pula dan pola-pola kebudayaan yang menjadi latar belakang pembentukan serta perkembangan kepribadian tersebut. Seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar sedikit banyaknya akan berpengaruh oleh pola-pola pemikiran dan kelompoknya. Selanjutnya keadaan tersebut dapat pula menyebabkan terjadinya pertentangan antar kelompok manusia.

3. Perbedaan kepentingan.

Perbedaan kepentingan antara individu maupun kelompok merupakan sumber lain dari pertentangan. Wujud kepentingan dapat bermacam-macam ada kepentingan ekonomi, politik, dan sebagainya.

4. Perubahan sosial.

Perubahan sosial yang berlangsung dengan cepat sementara waktu akan mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Dan ini menyebabkan terjadinya golongan-golongan yang berbeda pendiriannya, misalnya mengenai reorganisasi sistem nilai. Sebagaimana diketahui perubahan sosial mengakibatkan terjadinya disorganisasi dalam masyarakat.¹¹

Walaupun pertentangan merupakan suatu proses dissosiatif yang agak tajam, akan tetapi bertentangan sebagai salah satu bentuk proses sosial juga mempunyai fungsi positif bagi masyarakat. Apakah suatu pertentangan membawa akibat-akibat positif atau tidak, tergantung dari persoalan yang dipertentangkan dan juga dari struktur sosial tertentu, maka pertentangan-pertentangan tersebut bersifat positif. Oleh karena itu mempunyai kecenderungan untuk memungkinkan adanya penyesuaian kembali norma-norma dan hubungan sosial dalam kelompok bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu maupun bagian-bagian kelompok.

Dalam kelompok dimana para warganya mengadakan interaksi sosial dalam frekuensi yang tinggi kemungkinan terjadinya pertentangan dapat ditekan. Memang, benih-benih pertentangan kadang-kadang ada. Akan tetapi sudah menjadi anggapan

¹¹ Soerjono Soekanto. Struktur Masyarakat. 1987. Hal 86

umum bahwa untuk memelihara hubungan baik, seyogyanya benih-benih pertentangan jangan dibiarkan berkembang sehingga mengakibatkan terjadinya pertentangan maka kemungkinan besar keutuhan kelompok akan terancam, oleh karena pertentangan tidak saja langsung bersangkutan dengan sebab musababnya, akan tetapi segala perasaan tidak puas yang selamaitu ditekan, akan meletus. Kemudian, pertentangan tersebut akan meluas pada pertentangan pribadi yang dilandaskan pada perasaan.

Dalam kelompok dimana interaksional antar warga tidak terlalu rapat, kemungkinan besar pertentangan tidak akan membawa akibat negatif. Aneka macam pertentangan mungkin terjadi dalam kelompok-kelompok demikian, dan itu berarti bahwa perhatian para warga tidak hanya akan berpusat pada satu macam pertentangan saja. Pertentangan dianggap sebagai jalan untuk mengurangi ketegangan dan dibatasi hanya pada pokok persoalan penyebab saja pertentangan mempunyai beberapa bentuk khusus.

1. Pertentangan pribadi.

Tidak jarang terjadi bahwa dua orang sejak mulai bekenalan sudah saling tidak menyukai. Apabila permulaan yang buruk tadi dikembangkan, maka timbul rasa saling membenci. Maki-makian diucapkan, penghinaan dilontarkan dan seterusnya sampai mungkin timbul suatu perkelahian fisik. Apabila perkelahian dapat mungkin berhadapan muka lagi.

2. Pertentangan Rasial.

Dalam hal ini pun para akan menyadari betapa pentingnya perbedaan-perbedaan antara mereka yang seringkali menimbulkan pertentangan. Misalnya pertentangan antar orang-orang Negro dengan orang kulit putih di Amerika Serikat sebetulnya sumber pertentangan tidak hanya terletak pada perbedaan kepentingan bahwa salah satu ras merupakan golongan mayoritas.

3. Pertentangan antara kelas-kelas sosial.

Pada umumnya ia disebabkan oleh perbedaan kepentingan, misalnya perbedaan kepentingan, antara majikan dengan buruh.

4. Pertentangan politik.

Biasanya pertentangan ini menyangkut baik antara golongan dalam suatu masyarakat, maupun antara negara-negara yang berdaulat hal ini terakhir menimbulkan bentuk pertentangan berikutnya.

5. Pertentangan yang bersifat Internasional.

Ini sebabkan perbedaan-perbedaan kepentingan yang kemudian merembes kedaulatan dan itu berarti kehilangan muka dalam forum internasional. Tidak jarang pertentangan demikian menyulut perang total negara.¹²

Menurut *Soekanto* pertentangan berdampak sebagai berikut :

1. Tambahnya solidaritas in-group.

Apabila suatu kelompok bertentangan dengan kelompok yang lain maka solidaritas antara warga-warga kelompok biasanya akan erat. Maka bahkan

¹² Ibid. hal 107

bersedia berkorban demi keutuhan kelompoknya, dalam menghadapi ancaman-ancaman yang datang dari luar.

2. Apabila pertentangan antar golongan-golongan terjadi dalam satu kelompok tertentu, akibatnya adalah sebaliknya, yaitu goyah dan retaknya persatuan kelompok tersebut.
3. Perubahan kepribadian para individu.

Pertentangan yang berlangsung didalam kelompok atau antar kelompok selalu ada orang yang menaruh simpati kepada kedua belah pihak. Ada pribadi-pribadi yang tahan menghadapi situasi demikian, akan banyak pula yang merasa tertekan, sehingga merupakan penyiksaan terhadap manusia.

4. Hancurnya harta benda dan jatuhnya korban manusia.

Kiranya cukup jelas betapa menyebabkan penderita berat, baik bagi pemenang maupun bagi pihak yang kalah, baik dalam bidang kebendaan maupun kejiwaan raga manusia.

5. Akomodasi, dominasi dan takluknya salah satu pihak.

Apabila kekuatan pihak-pihak yang bertentangan seimbang, maka mungkin timbul akomodasi. Ketidakseimbangan antar kelompok yang bertikai akan menyebabkan dominasi salah satu pihak terhadap lawannya. Kedudukan pihak yang didominasi adalah sebagai pihak yang takluk terhadap kekuasaan lawannya secara terpaksa.¹³

¹³ Ibid. hal 19

D. PENYELESAIAN KONFLIK

Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) menurut *Maswadi Rauf* adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan atau menghilangkan konflik dengan cara mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik. Penyelesaian konflik didasarkan atas adanya perubahan pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat konflik sehingga tidak ada lagi pertentangan antara mereka. Dengan demikian terjadi perubahan dalam pandangan dari salah satu atau semua pihak yang terlibat. Hal inilah yang membuat penyelesaian konflik bukanlah pekerjaan yang mudah karena amat sulit bagi seseorang untuk mengubah pendapatnya yang berbeda dan bertentangan dengan pendapat orang lain sehingga pendapat itu mutlak diperlukan untuk mencegah :

1. Semakin mendalamnya konflik, yang berarti semakin tajamnya perbedaan antara pihak-pihak yang berkonflik.
2. Semakin meluasnya konflik, yang berarti semakin banyaknya jumlah peserta masing-masing pihak yang berkonflik.¹⁴

Bila penyelesaian konflik tidak kunjung dapat dicapai, biasanya konflik berkembang semakin mendalam dan luas. Bila tidak ditemukan cara penyelesaian konflik yang efektif, konflik dapat menimbulkan ancaman disintegrasi masyarakat, yaitu terpecahnya masyarakat sesuai dengan garis yang memisahkan pihak-pihak yang terlibat konflik sehingga seluruh atau sebagian warga masyarakat terlibat dalam

¹⁴ Maswadi Rauf. *Konsensus dan Konflik Politik*. 2001. Hal 8

pertentangan yang dapat menghasilkan dua kelompok masyarakat yang terpisah dan bermusuhan.

Apabila konflik terjadi dalam sistem sosial-politik yang stabil dan mapan ; maka pihak-pihak yang saling bertentangan biasanya berusaha menyelesaikan pertentangan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang sudah melembaga, seperti badan perwakilan rakyat, pers, dan pengadilan. Keputusan dari lembaga konflik ini akan mengikat mereka, sehingga ketegangan yang timbul dari konflik akan hilang. Namun konflik yang terjadi dalam sistem sosial-politik yang belum stabil dan belum mapan cenderung diselesaikan lewat jalan kekerasan dengan cara memaksakan keinginannya. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme penyelesaian konflik yang melembaga, sehingga dalam masyarakat seperti ini cenderung berfungsi negatif terhadap integrasi masyarakat.

Ada dua cara penyelesaian konflik yang dikemukakan *Maswadi Rauf*, yaitu :

1. Penyelesaian konflik secara persuasif (persuasive).

Cara persuasif menggunakan perundingan dan musyawarah untuk mencari titik temu antara pihak-pihak yang berkonflik. Pihak-pihak yang berkonflik melakukan perundingan, baik antara mereka saja, maupun menggunakan pihak lain (pihak ketiga) yang bertindak sebagai mediator atau juru damai.

Cara penyelesaian konflik secara persuasif menghasilkan penyelesaian konflik secara tuntas, artinya tidak ada lagi perbedaan antara pihak-pihak yang tadinya berkonflik karena titik temu telah dihasilkan atas keinginan sendiri. Oleh

karena itu cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah cara yang idal dan lebih baik dibandingkan dengan cara penyelesaian konflik koersif.

Meskipun begitu, cara penyelesaian konflik secara persuasif adalah sulit karena memerlukan tenaga dan waktu yang banyak untuk mencapai hasil. Cara persuasif dalam penyelesaian konflik bersifat manusiawi karena lebih sesuai dengan sifat-sifat manusia. Manusia ditandai dengan kemampuannya untuk menggunakan rasio (akal sehat) dengan memomorduakan kekerasan fisik.

Cara persuasif merupakan keterampilan dalam penyelesaian konflik yang menjadi tuntutan demokrasi. Masyarakat yang mampu mengembangkan cara-cara persuasif dalam penyelesaian konflik adalah masyarakat yang mempunyai potensi yang besar dan sukses dalam menegakkan demokrasi. Demokrasi yang menginginkan adanya kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat, dan berkumpul membuka peluang dan membiarkan terjadinya konflik di dalam masyarakat. Kongkritnya, kebebasan berbicara dan berpendapat akan menghasilkan konflik yang besar di dalam masyarakat karena warga masyarakat bebas berpendapat dan mengutarakan pendapat mereka. Hal ini berarti terciptanya konflik dalam jumlah dan intensitas yang besar di dalam masyarakat.

2. Penyelesaian konflik secara koersif

menggunakan kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik atau ancaman kekerasan fisik untuk menghilangkan perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang terlibat konflik. Kekerasan fisik mencakup

penggunaan benda-benda fisik untuk merugikan secara fisik, menyakiti, melukai, atau membunuh pihak lain. Cara koersif menghasilkan penyelesaian konflik dengan kualitas yang rendah karena yang sebenarnya belum selesai secara tuntas. Titik temu atau mufakat terbentuk secara terpaksa sehingga sesungguhnya pihak yang lebih lemah menyetujui pendapat yang lebih kuat tidak atas dasar kesadaran dan keinginan sendiri.¹⁵

Dari sinilah terlihat bahwa penyelesaian konflik secara koersif bagi munculnya kembali konflik yang lebih hebat di masa-masa yang akan datang. Cara koersif ini hanyalah menyembunyikan konflik, tidak menyelesaikannya.

Berdasarkan kebiasaan, orang menyelesaikan suatu masalah yakni cara yang lebih mudah (nonformal) dan selanjutnya cara yang resmi (formal).

Berikut ini bentuk pengendalian konflik-konflik sosial yang dikemukakan Nasikun adalah sebagai berikut :

1. Konsiliasi (*Conciliation*)

Adalah suatu usaha untuk mempertemukan keinginan-keinginan pihak-pihak yang berselisih, bagi tercapainya suatu persetujuan bersama, bagi pihak-pihak yang bersengketa ada kesempatan untuk mendiskusikannya melalui suatu lembaga tertentu. *Soekanto* (1987 : 66). Nasikun mengambil contoh didalam kehidupan politik, lembaga-lembaga semacamnya yang berupa lembaga-lembaga bersifat parlementer atau koalisi parlementer, di mana berbagai kelompok kepentingan atau wakil-wakil

¹⁵ Ibid. hal 10

mereka saling bertemu satu sama lain untuk mewujudkan pertentangan-pertentangan mereka melalui cara-cara yang bersifat damai.

2. Mediasi (*Mediation*)

Maksud dan mediasi adalah di mana kedua belah pihak yang bersengketa bersama-sama bersepakat untuk menunjuk pihak ketiga yang akan memberikan "Nasehat-nasihatnya" tentang bagaimana mereka sebaiknya menyelesaikan pertentangan mereka. Kedua belah pihak yang terlibat dengan konflik bebas memilih antara menerima atau menolak keputusan yang diberikan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ini tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan-keputusan penyelesaian. Pihak ketiga ini, hanyalah perantara sebagai penasehat.

3. Perwasitan (*Arbitration*)

Didalam hal ini kedua belah pihak yang bertentangan sepakat untuk menerima atau "terpaksa" menerima pihak ketiga yang akan memberikan "keputusan-keputusan" tertentu untuk menyelesaikan konflik yang akan terjadi diantara mereka. Pihak ketiga atau wasit mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan pihak-pihak yang sedang konflik.

Ketiga jenis pengendalian konflik yang dikemukakan oleh *Nasikun* tersebut, baik dipandang sebagai cara-cara pengendalian konflik yang bertingkat atau dipandang sebagai cara-cara yang berdiri sendiri memiliki daya kemampuan untuk mengurangi atau menghindarkan kemungkinan-kemungkinan timbulnya ledakan-ledakan sosial dalam bentuk kekerasan. Sejah hubungan-hubungan sosial berdasarkan ketiga jenis mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial tersebut

berkembang, maka konflik-konflik sosial akan kehilangan pengaruhnya yang akan merusak. Sebaliknya, konflik-konflik tersebut akan menjelma kedalam pola hubungan-hubungan sosial yang melembaga, suatu hal yang akan dapat meredusir kegoncangan-kegoncangan sosial yang akan bersifat revolusir dan menjadi evolusiner. Dengan kata lain, melalui mekanisme pengendalian konflik-konflik sosial diantara berbagai kelompok kepentingan justru akan mendorong terjadinya perubahan sosial yang tidak akan berakhir.¹⁶

Selain itu, menurut *Winardi* masih ada cara lain untuk menyelesaikan konflik (*resolution conflict*) adalah sebagai berikut :

a. Bersikap acuh terhadapnya

Sikap acuh berarti tidak adanya upaya langsung untuk menghadapi sebuah konflik yang telah termanifestasi. Maka dalam keadaan demikian, konflik dibiarkan berkembang menjadi sebuah kekuatan konstruktif atau sebuah kekuatan destruktif.

b. Menekan

Menekan sebuah konflik yang terjadi (*suppression*), menyebabkan menyusutnya dampak konflik yang negatif, tetapi ia tidak mengatasi ataupun mentiadakan pokok-pokok penyebab timbulnya konflik tersebut. Ia hanya merupakan sebuah pemecahan semu (*surfase solution*), yang akan menyebabkan kondisi-kondisi anteseden, yang merupakan penyebab onsional terjadinya konflik tetap ada.

¹⁶ Nasikun. Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia. 1974. Hal 27

c. Menyelesaikannya

Penyelesaian konflik (*conflict resolution*) hanya terjadi, apabila alasan-alasan latar belakang terjadinya suatu konflik ditiadakan dan tidak sisahkan kondisi yang menggantung antaginisme atau penyebabnya timbulnya lagi pada masa pendatang.¹⁷

E. KONSEP IDENTITAS

Pada dasarnya, karakter individu berakar pada identitas dasar semenjak lahir seperti suatu anugrah yang tidak bisa dihindari. Identitas dasar itulah yang kemudian membentuk “keakuan” dan membedakannya dengan yang lain.(kamu, mereka dan dia). Hakikat dasar individu maupun kelompok tercermin dan terbentuk dari unsur yang melekat atau sengaja dilekatkan pada tubuh atau diri sang bayi ketika lahir.

Terkait dengan pemikiran diatas, Jary¹⁸ menyebutkan bahwa identitas adalah jati diri yang terkait dengan perasan diri, yaitu rasa diri yang berkembang dalam masa pertumbuhan dari anak-anak yang membedakan segala perilakunya dengan orang tua, keluarga dan masyarakat dimana ia berada. Dalam hal ini identitas lebih berorientasi pada kesadaran pada diri sendiri (siapa mereka/aku), apa yang paling baik dan berarti baginya dan apa yang dapat dilakukan untuk mempertahankan dirinya.

Keterkaitan antara identitas internal dan eksternal melahirkan pengukuhan atau “pencipta”. Hal ini menjadi sprit atas proses kelahiran yaitu mengacu pada penciptaan suatu identitas bersama berkaitan dengan nilai-nilai dan simbol-simbol

¹⁷ Ibid. Hal 17

¹⁸ Jary.(dalam Haralambos, 2000:885)lihat Makalah Gustiana A kambo. Hal 30

yang mendasari landasan suatu sistem dalam masyarakat. Masalah penciptaan identitas bersama selalu berkisar pada perkembangan keyakinan dan nilai-nilai yang dianut bersama yang dapat memberi masyarakat di wilayah tertentu suatu perasaan solidaritas sosial. Suatu identitas bersama menunjukkan bahwa individu-individu tersebut setuju atas pendefinisian diri mereka atas yang saling diakui, yakni suatu kesadaran mengenai perbedaan mereka dengan orang lain, dan suatu perasaan akan harga diri bersama mereka. Seringkali gagasan (ide, nilai, norma dan simbol ekspresif yang dianut bersama definisi, kesadaran dan penghargaan kehormatan diri.

Dari uraian diatas, penulis dapat menarik pengertian dasar atas identitas. Identitas diartikan sebai suatu proses kesadaran diri akan keberadaan dilingkungan manapun, sehingga apa yang berarti dan baik buatnya akan dipertahankan untuk dapat dikenali oleh pihak lain agar tetap eksis dan diakui.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami prilaku manusia dari sudut pandang subjek yang diteliti. Teori menekankan bahwa prilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan individu-individu untuk membentuk prilaku mereka dengan mempertimbangkan ekspektasa orang-orang yang berintegrasi dengan mereka. Definisi yang penempatannya kepada orang lain, situasi, objek bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan prilaku mereka.

Konsep interaksionalisme dari Meltzer yang dikutip Litlejohn yang dapat mengidentifikasi sebagai konsep sentral tradisi interaksi simbolik¹⁹ yakni :

¹⁹ Litlejhon.(dalam Makalah Gustiana A Kambo). hal 68

1. Orang dapat mengerti dengan belajar dari pengalaman, persepsi orang diterjemahkan dalam simbol.
2. Berbagai arti dipelajari melalui interaksi diantara orang-orang dari pertukaran symbol dan kelompok sosial.
3. seluruh struktur dan institusi diciptakan dari interaksi dengan orang lain.
4. Tingkah laku seseorang tidak mutlak ditentukan oleh kejadian masa lampau saja, tetapi juga dilakukan secara sengaja.
5. Pikiran terdiri dari percakapan internal, Yang merefleksikan interaksi dengan orang lain.
6. Tingkah laku terbentuk didalam kelompok social selama proses interaksi.
7. Untuk memahami pengalaman seorang individu dengan memahami tingkah lakunya belaka. Pemahaman dan pengertian seseorang akan berbagai hal harus diketahui pula secara pasti.

Gambaran yang diperoleh dari interaksi simbolik diartikan sebagai satu dari berbagai individu yang mencoba mencari tujuan mereka dengan cara berinteraksi dengan orang lain. Pengalaman mereka selalu terbentuk dari berbagai arti yang timbul akibat penggunaan symbol dalam kelompok social tersebut. *Meaning* yang merupakan hal pokok dari pengalaman, adalah sebuah produk dari interaksi, yang membuat komunikasi menjadi inti dari pengalaman seorang manusia.

Perspektif interaksi simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek yang diteliti. Teori menekankan bahwa perilaku manusia dilihat sebagai suatu proses yang melibatkan individu-individu untuk membentuk perilaku

mereka dengan mempertimbangkan ekspektasi orang-orang yang berintegrasi dengan mereka. Definisi yang penempatannya kepada orang lain, situasi, objek bahkan diri mereka sendirilah yang menentukan perilaku mereka.

F. EKSISTENSI ETNIS TIONGHOA DI INDONESIA

Penduduk Tionghoa di Indonesia dalam tahun 1860 berjumlah kurang lebih 222.000 dan selama tiga dasawarsa pertama dari abad ke-20 kadar migrasi orang Tionghoa bertambah berkurang lagi dalam dasawarsa menjelang pecahnya perang dunia ke-II. Selama zaman perang pasifik dan pendudukan Jepang, tak ada migrasi orang Tionghoa ke Indonesia. Seorang ahli antropologi G.W. Skinner memperkirakan bahwa jumlah total orang Tionghoa di Indonesia sekitar 1961 adalah sebesar 2.450.000 yang berarti 2,5% dari penduduk yang waktu itu berjumlah 96 juta.²⁰

Para perantau Cina yang datang ke Indonesia telah mengalami suatu proses *asimilasi* dan *amalgamasi* (perkawinan campuran). Keturunan dari perkawinan campuran seperti itu biasanya diakulturasi ke dalam kebudayaan Cina, namun pengaruh kebudayaan itu toh juga ada, dan kebudayaan campuran yang dengan demikian berkembang di Indonesia disebut kebudayaan *peranakan*.

Kontjaraningrat mengemukakan bahwa sampai berapa jauh unsur-unsur kebudayaan pribumi tercampur kedalam kebudayaan *peranakan* itu, berbeda-beda diberbagai di wilayah Indonesia, tetapi dipandang dari sudut pandang orang Indonesia pribumi ada dua stereotipe etnik mengenai orang Tionghoa, ialah golongan Tionghoa yang mempergunakan bahasa pribumi dan mengambil banyak adat istiadat di

²⁰Skinner. Masyarakat Cina Di Thailand. Hal 99

Indonesia pribumi, dan golongan Tionghoa yang tidak mempergunakan bahasa pribumi dan hampir tidak mengambil alih adat istiadat Indonesia pribumi. Golongan yang pertama itulah yang disebut Tionghoa *peranakan* sedang golongan kedua disebut Tionghoa *totok*. Istilah *totok* yang demikian itu yaitu orang Tionghoa yang kurang terasimilasi kedalam kebudayaan suku bangsa pribumi sekitarnya, juga diterapkan terhadap orang Tionghoa pendatang baru.²¹

Sejak dasawarsa pertama dari abad ke-20, jarak kebudayaan antara orang Tionghoa dan penduduk pribumi bertambah besar. Salah satu sebab dari proses itu adalah bahwa kadar migrasi orang Tionghoa ke Indonesia bertambah amat pesat sejak dasawarsa pertama abad ke-19 dan ketiga dasawarsa pertama abad ke-20, yang menyebabkan bertambahnya orang Tionghoa *totok*. Sebab kedua adalah bahwa banyak perantau yang membawa serta istri dan keluarga mereka, sehingga perkawinan campuran antara Tionghoa dan wanita pribumi berkurang. Sebab ketiga adalah timbulnya nasionalisme Cina, dimana *DR. Sun Yat Sen* dalam tahun 1911 menggulingkan pemerintahan raja *Manchu* di Peking dalam sebuah revolusi bersenjata dan mendirikan suatu partai pemerintahan partai *Kuo Min Tang* di Kanton. Peristiwa ini memberikan kepada perantau Tionghoa di Asia Tenggara pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya suatu orientasi politik dan kebudayaan yang baru.

²¹Koentjaraningrat. Bunga Rantai Masalah-masalah Pembangunan. 1984. Hal 360

G. KERANGKA PEMIKIRAN

Secara historis hubungan etnis Tionghoa dan penduduk di Makassar dahulu sangat baik dan akrab. Akan tetapi, sejak kedatangan kolonial Belanda di Makassar. Kekerabatan antara etnis kemudian menjadi renggang. Hal ini berkaitan dengan cara pemerintah Belanda memisahkan penduduk secara kategori etnis dan peranannya. Dengan adanya pemisahan tersebut, jurang ekonomi antara keduanya semakin jauh.

Dalam usaha memahami tentang studi antar etnis yakni etnis Tionghoa dan Makassar, maka indikator yang digunakan yaitu:

Pertama, konflik etnis, sebagai landasan dasar dalam memahami konflik itu sendiri. Adapun terjadinya konflik antar etnis Tionghoa dan Makassar berawal dari diskriminasi sosial yang dibagi oleh pemerintah Belanda selama menduduki wilayah Indonesia.

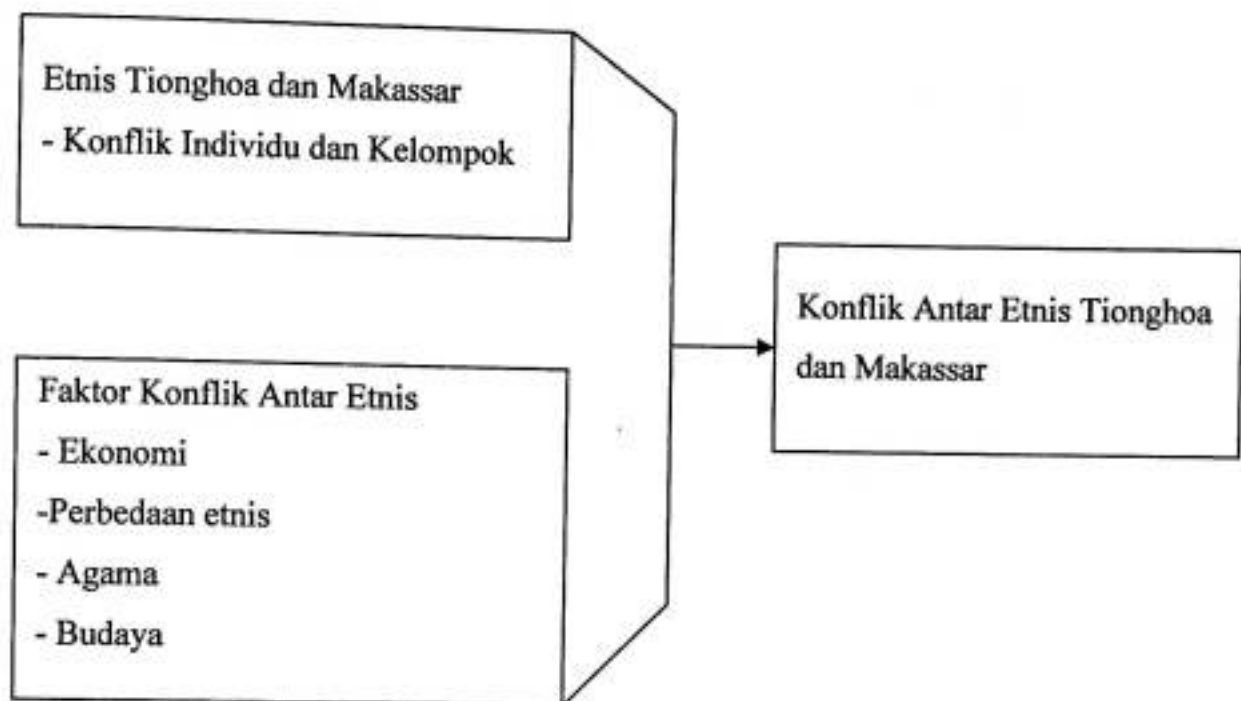
Kedua, konflik individu dan kelompok dimana selalu diawali dengan kasus atau fenomena kejahatan yang sedang terjadi menyangkut antar etnis. Sistemnya melihat dari isu SARA yang sangat memanas. Dalam memahami konflik yang terjadi penulis mengambil teori kajian sebagai dasar pemikiran. Sehingga keselarasan dalam melihat konflik berbanding lurus dengan etnisitas komunitas masyarakat.

Dalam kajian konflik, adanya batasan-batasan indikator untuk pemahaman secara jelas. Dari fenomena yang telah terjadi, terjadinya konflik antar etnis ada beberapa faktor-faktor pemicu antar lain yaitu:

1. Ekonomi, sejak berlakunya diskriminasi peran sosial pemberian dari pemerintah Belanda dan adanya perlakuan khusus pula dari pemerintah Orde Baru.
2. Perbedaan etnis, sangat terlihat jelas dari perbedaan fisik yang menonjol. Yakni warna kulit, bentuk muka, bahasa dan sebagainya menjadi interaksi sosial tidak berjalan dengan baik.
3. Agama, dari pembauran yang sudah ada kini etnis Tionghoa tidak hanya menganut Khong Hu Cu tetapi ada juga yang beragama kristen, katolik, bahkan Islam. Konflik antar etnis Tionghoa dan Makassar yang pernah terjadi bukan akibat perbedaan agama. Peran agama sendiri sebagai peredam konflik
4. Budaya, sangat mempengaruhi perilaku seseorang karena merupakan cara dan aturan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Kini masyarakat Tionghoa diberi kebebasan dalam menjalankan budaya seperti Imlek dan Cap Go Me.

H. Model Analisis

Bertolak dari semua pemikiran tersebut di atas, maka untuk menyamakan persepsi terhadap permasalahan yang dikemukakan, akan digambarkan model analisis sebagai berikut :



I. DEFINISI OPERASIONAL

Dalam pelaksanaan penelitian ini diperlukan adanya batasan- batasan penelitian yang dioperasionalkan melalui indikator-indikator sebagai berikut :

1. Konflik etnis adalah pertentangan yang terjadi antara etnis yang satu dengan etnis lainnya. Hal ini dapat diukur dari 2 indikator yakni:
 - a. Konflik antar individual adalah pertentangan yang terjadi antara dua orang yang tidak melibatkan kelompok-kelompok lain.
 - b. Konflik kelompok adalah konflik yang terjadi antar dua kelompok atau lebih.
2. Faktor faktor pemicu konflik adalah aspek ekonomi, perbedaan identitas kultural antara etnis Tionghoa dan etnis Makassar. Hal ini dapat diukur dengan 4 indikator :
 - a. Aspek ekonomi antara etnis Tionghoa dan etnis Bugis Makassar
 - b. Perbedaan etnis
 - c. Agama
 - d. Budaya
3. Pengelolahan konflik fungsional pada tingkat individu dan kelompok.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijelaskan metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam membahas rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Metode penelitian tersebut terdiri atas lokasi dan waktu penelitian, tipe dan dasar penelitian, teknik pengumpulan data, jenis data, pengolahan dan analisis data serta definisi operasional.

A. LOKASI PENELITIAN

Adapun daerah yang menjadi obyek penelitian adalah Kota Makassar. Pemilihan Kota Makassar sebagai daerah penelitian berdasarkan karena Kota Makassar sebagai salah satu daerah yang masih terjadi pemisahan sosial antara etnis tionghoa dan etnis Bugis Makassar. Disamping itu etnis Tionghoa masih kurang dilibatkan dalam struktur politik.

B. TIPE DAN DASAR PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Deskriptif Analisis, yaitu Untuk menggambarkan dan menganalisis konflik antara etnis Tionghoa dengan Makassar dan faktor-faktor penyebab terjadinya konflik. Penelaahannya dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail dari komprehensif berbagai variabel yang ditelusuri. Studi kasus dilakukan terhadap individu dan juga terhadap kelompok. Dimana mengkaji konflik etnis ditinjau dari pendekatan struktural, studi kasus terhadap etnis Cina di Makassar.

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus, yaitu tipe pendekatan dalam penelitian yang ditujukan pada beberapa individu atau kelompok dengan mempelajari kenyataan-kenyataan pada objek penelitian.

C. JENIS DATA

Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan oleh penulis adalah :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Dalam pelaksanaan teknik ini penulis mengumpulkan data melalui komunikasi langsung dengan para informan.
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung. Data melalui studi kepustakaan yaitu : buku, majalah, surat kabar dan literatur-literatur yang sesuai dengan maksud penelitian.

D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Penulis mewawancarai informan yang menjadi sumber data penelitian secara langsung dan mendalam, dengan menggunakan pedoman wawancara.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan terhadap kondisi lapangan dalam kaitannya dengan judul penelitian.

3. Studi pustaka

Selain melakukan wawancara penulis juga melakukan kajian kepustakaan dengan membaca sumber-sumber literatur mengenai politik etnis khususnya etnis Tionghoa berupa buku-buku, majalah, surat-kabar dan informan tertulis lainnya.

E. TEKNIS ANALISIS DATA

Teknik penulisan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Berupaya membuat pola atau karakteristik (tipe) dari konflik yang terjadi antara etnis Tionghoa dan Makassar.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis mendeskripsikan secara umum mengenai Kota Makassar secara umum dengan etnik di dalamnya. Dimana yang menjadi dasar penelitian adalah etnik Makassar dan etnik Tionghoa.

A. Kota Makassar

Makassar yang terletak di pulau Sulawesi bagian selatan yang tepatnya di koordinat 119 24-120 38 Bujur Timur dan 5 8-6 19 Lintang Selatan merupakan daratan yang landai dengan ketinggian rata-rata 0-10 meter dari permukaan laut. Luas wilayah Kota Makassar adalah 2.506,8 Ha dari luas kota lama menjadi 17.577 Ha. Setelah mengalami perluasan pada tahun 1971 dengan dimasukkannya tiga kecamatan yaitu Tamalate, Panakukkang dan Biringkanaya, serta ditambah tiga buah bekas Kabupaten Pangkep. Serta mengenai batas-batas wilayah kota Makassar adalah; di sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Gowa, di sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Pangkep, di sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Maros dan di sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar.

Hampir 100% dari wilayah kota Makassar merupakan dataran rendah dengan beriklim sedang dan curah hujan yang normal dan cocok untuk pertanian dan perikanan. Akan tetapi mengingat Kota Makassar sebagai ibukota administratif pemerintahan dan ibu kota propinsi Sulawesi Selatan maka pengembangannya di arahkan pada sektor industri, perumahan, rekreasi, dan pelayanan jasa dan umum.

Nama Makassar sepertinya begitu bertuah bagi penduduk kota yang terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan. Meskipun semenjak tahun 1991 resmi bernama Ujung Pandang, tetapi banyak kalangan terus berupaya untuk memakai kembali nama Makasar. Dan puncaknya adalah pada tanggal 13 Oktober 1999 lalu yang ketika nama yang syarat nilai historis itu resmi digunakan kembali. Makassar yang didirikan oleh dua kerajaan maritime Gowa-Tallo I sudah menjadi kota besar. Tidak itu saja, kota ini disebut-sebut sebagai kota metropolitan sekaligus mengemban berbagai fungsi sebagai pusat pelayanan, perdagangan, pendidikan dan maritime di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Kebudayaan Bugis Makassar adalah kebudayaan dari suku-suku Bugis Makassar yang mendiami bagian terbesar dari jazirah selatan pulau Sulawesi, selain suku Bugis Makassar, daerah Sulawesi Selatan juga dihuni oleh suku Toraja dan Mandar, orang-orang Bugis umumnya mendiami daerah Bulukumba, Sinjai, Bone, Soppeng, Wajo, Rappang, Pinrang, Polmas, Enrekang, Luwu dan Parepare.

Orang Makassar sendiri mendiami daerah Gowa, Takalar, Jenepono, Bantaeng, Maros dan Pangkajene. Orang Toraja sebagian besar mendiami daerah Tana Toraja dan Mamasa, sedangkan orang Mandar mendiami daerah Majene dan Mamuju.



Gambar Peta Sulawesi selatan

Tabel 1
Luas Wilayah Persentase dan Luas Wilayah
Menurut Kecamatan di Kota Makassar

No	Kecamatan	Luas	Persentase Terhadap Luas Kota Makassar
1	Mariso	18,2	1,04
2	Mamajang	2,25	1,28
3	Tamalate	20,21	12,07
4	Rappocini	9,23	5,25
5	Makassar	2,52	1,43
6	Ujung Pandang	2,63	1,50
7	Wajo	1,99	1,13
8	Bontoala	2,10	1,19
9	Ujung Tanah	5,94	3,38
10	Tallo	5,83	3,32
11	Manggala	17,05	9,70
12	Panakukang	24,14	13,73
13	Biringkanaya	48,22	27,43
	Jumlah	175,77	100,00

Sumber: kantor Statistik kota Makassar, 2006

Tabel 2
Jumlah Desa / Kelurahan
Menurut Kecamatan di Kota Makassar (2004)

Kode Wil.	Kecamatan	Kelurahan	RW	RT
010	Mariso	9	46	212
020	Mamajang	13	57	295
030	Tamalate	10	91	498
040	Rappocini	10	104	522
050	Makassar	14	69	375
060	Ujung Pandang	10	37	142
070	Wajo	8	45	170
080	Bontoala	12	56	246
090	Ujung Tanah	12	51	206
100	Tallo	15	77	474
101	Panakukang	11	90	438
102	Manggala	6	60	314
103	Biringkanaya	7	87	387
104	Tamalanrea	6	63	301
7371	Makassar	143	933	4500

Sumber: kantor Statistik kota Makassar, 2005

Tabel 3
Banyaknya Anggota DPRD Kota Makassar
Menurut Fraksi dan Jenis Kelamin

Fraksi	Banyaknya Anggota DPRD		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01. Partai Persatuan Pembangunan	5	-	5
02. Partai Golkar	13	2	15
03. PKS	4	1	5
04. Persatuan Demografi Kebangsaan	5	-	5
05. Partai Amanat Nasional	5	-	5
06. Demokrat Bersatu	9	-	9
Jumlah 2004	41	3	44
Total 2003	42	3	45

Sumber: kantor DPRD kota Makassar, 2005

Tabel 4
Banyaknya Anggota DPRD Kota Makassar
Menurut Komisi dan Jenis Kelamin

Fraksi	Banyaknya Anggota DPRD		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
01. Komisi A	9	2	11
02. Komisi B	11	-	11
03. Komisi C	8	1	9
04. Komisi D	9	-	9
05. Unsur Pimpinan Daerah	3	-	3
Jumlah 2004	40	3	43
2003	42	3	45

Sumber: kantor DPRD kota Makassar, 2005

Kota Makassar sebagai kota perdagangan, jasa, dan transportasi telah menempati posisi strategis di Indonesia bagian Timur. Kedudukannya sebagai daerah transit dan merupakan daerah lalu lintas perdagangan dan transportasi serta pusat administrasi pemerintahan Sulawesi Selatan, telah membawa dampak yang sangat besar terhadap pembangunan sosial ekonomi dan laju pertumbuhan penduduk. Ini adalah konsekuensi yang wajar bagi suatu kota yang sedang berpacu dalam pembangunan.

Meningkatnya pelayanan kesehatan, pendidikan dan fasilitas lainnya serta sarana hiburan, telah mengundang atau merangsang terjadinya urbanisasi, yakni perpindahan penduduk dari desa ke kota. Hal ini kita dapatkan dengan melihat kemajemukan penduduk Kota Makassar, yang terdiri dari beberapa etnis.

Adapun suku bangsa yang nampak paling dominan, adalah suku Bugis-Makassar kemudian beberapa suku lainnya seperti Toraja dan Mandar. Sementara penduduk dari luar Sulawesi Selatan non pribumi, seperti misalnya etnis Tionghoa, Pakistan, Filipina, Arab, India, dan lain-lain. Tapi yang paling menonjol dari keseluruhan etnis tersebut untuk konteks Indonesia secara umum dan Makassar khususnya adalah mereka yang beretnis Tionghoa. Selain jumlahnya yang relatif banyak, peran mereka dalam bidang ekonomi Indonesia dan Makassar terbilang sangat maju dan menonjol.

Untuk memberikan gambaran secara umum, berikut ini akan dapat dikemukakan komposisi warga negara Indonesia keturunan etnis Tionghoa yang

bermukim dalam wilayah kota Makassar dengan rincian tiap kecamatan yang ada di Makassar.

Label 5
Distribusi Warga Keturunan Etnis Tionghoa Kota Makassar
Dirinci Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Keluarga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Mariso	14	213	252	465
2	Mamajang	271	129	142	271
3	Tamalate	75	156	119	275
4	Makassar	715	571	498	1069
5	Ujung pandang	216	1017	1083	2100
6	Wajo	1457	3203	3593	6792
7	Bontoala	396	736	833	1569
8	Ujung Tanah	40	118	132	250
9	Tallo	44	98	107	205
10	Panakukang	34	62	53	115
11	Biringkanaya	4	-	-	4
	Jumlah	3.336	6.303	6.812	13.119

Sumber : Kantor Statistik Kota Makassar, 2006

Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa jumlah penduduk keturunan etnis Tionghoa untuk kota Makassar, jumlah terbesar berada dalam wilayah kecamatan Wajo, yakni sebanyak 6796 jiwa. Kawasan kecamatan Wajo dengan jumlah penduduk nonpribumi yang banyak ini kemudian mendapat julukan kawasan pecinaan Makassar. Selain jumlah, kentalnya budaya etnis yang dipelihara oleh masyarakat Cina yang berdiam di Kecamatan Wajo, terutama yang berada di jalan Sulawesi.

Dalam kecamatan Wajo terdapat *Klenteng* yang merupakan tempat ibadah etnis Tionghoa sebagai bentuk penghargaan terhadap leluhur mereka.

B. Etnis Makassar

Orang Bugis mengucapkan bahasa ugi dan orang Makassar menggunakan Makassar, kedua bahasa itu dipakai juga dalam naskah-naskah Bugis Makassar kuno yang dikenal dengan nama aksara lontara, sistem aksara kemudian disederhanakan oleh Syahbandar Kerajaan Gowa, Daeng Pamatte, sejak masuk Islam abad ke-17 maka kesusastraan Bugis Makassar ditulis dalam huruf Arab.

Dalam perkawinan, ada Bugis Makassar menetapkan perkawinan yang ideal adalah antar sepupu baik pertama, kedua maupun ketiga. Akan tetapi walaupun dianggap ideal tapi tidaklah merupakan hal yang diwajibkan, sehingga banyak pemuda-pemuda yang kawin tidak dengan saudara sepupunya.

Orang Bugis Makassar terutama yang hidup di luar kota, dalam kehidupan sehari-harinya masih banyak terikat oleh sistem norma dan aturan adat yang keramat dan sakral. Sistem adat orang Bugis Makassar itu berdasarkan atas lima unsur pokok, yaitu:

- *Ade'* (ada' dalam Makassar) yaitu norma ihwal perkawinan, hubungan kekeberatan dan berwujud sebagai kaidah-kaidah perkawinan, keturunan, aturan mengenai hak dan kewajiban dalam berumahtangga serta hal ihwal mengenai bernegara dan memerintah negara, dan berwujud sebagai hukum negara.
- *Bicara*, yaitu semua aktivitas dan konsep-konsep yang bersangkutan paut dengan peradilan, kurang lebih sama dengan hukum acara.

- *Rapang*, berarti contoh, perumpamaan, kias atau analogi, rapang menjaga kepastian dari suatu keputusan yang tidak tertulis dalam masa lampau sampai sekarang, rapang juga bisa berwujud perumpamaan-perumpamaan yang menganjurkan kelakuan ideal dan etika dalam lapangan hidup tertentu.
- *Wari'*, adalah unsur yang melakukan klasifikasi dari segala benda peristiwa dan aktivitas dalam kehidupan masyarakat, misalnya untuk memelihara susunan dan penempatan hal-hal dan benda-benda dalam kehidupan; untuk memelihara jalur dan garis keturunan yang mewujudkan pelapisan sosial.
- *Sara'*, yaitu unsur yang mengandung pranata-pranata dan hukum islam.

Kelima unsur ini yang menjadi sumber semua tingkah laku dalam membangun segenap aspek kebutuhan rohani dan kebutuhan fisik. Di dalam penerapan kelima unsur itu, untuk menjalinnya ke dalam suatu sistem yang utuh agar antara sistem kepribadian, sistem kemasyarakatan dan sistem budaya (pangadereng) terjalin keserasian dan keseimbangan dalam memberikan dinamika kehidupan, maka terdapatlah sesuatu yang merupakan inti atau alat integrasi dari semua itu.

Pada masyarakat Bugis/Makassar yang menjadi inti atau alat integrasi dari pangadereng mereka adalah *siri'*. *Siri'* sebagai motif yang terdalam dari segenap hidupnya, berpikir, merasa dan berprakarsa.

Siri' sebagai inti, menyatakan diri dengan sangat keras pada salah satu isi pangadereng yang masih mampu bertahan. Sejarah kebudayaan orang Bugis/Makassar dalam arti secara keutuhan pangadereng sudah berakhir sejak negeri ini mengalami

keruntuhan dan kehilangan kemerdekaannya. Unsur satusatunya yang masih dapat bertahan dalam kepincangan adalah *wari'* yaitu unsur pangadereng yang mengatur jenjang kehidupan dalam pembinaan keluarga diantaranya soal perkawinan. Inilah satusatunya unsur yang masih dipunyai dan masih dapat dikuasai maka ke dalam unsur ini tercurah segenap kepekaan kehidupan orang Bugis/Makassar.

Unsur-unsur tersebut satu sama lain terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis ke alam pikiran orang Bugis Makassar, yang memberi rasa sentimen ke warga masyarakat dan identitas sosial kepadanya, dan juga martabat dan rasa harga diri.

Sejak manusia itu berada pada tingkat dimana dia telah memahami apa arti kehidupan dalam dunia realitas seperti telah digariskan oleh pangadereng maka mulai saat itulah *siri'* berperan aktif dalam kehidupan manusia sampai pada akhir hayatnya. Kecuali itu, perlu diperhatikan faktor manifestasi dari tindakan apa perbuatan dari *siri'* di masyarakat.

Siri' dalam konteks manifestasi perbuatan tidaklah dalam satu bentuk saja, tetapi terwujud dalam berbagai bentuk tindakan, demikian juga dengan sifat-sifat dari tindakan itu, semuanya tergantung dari sasaran, cita-cita, keinginan dan ambisi yang kesemuanya itu tidak dapat terlepas dari faktor sebab akibat yang juga merupakan latar belakang dari lahirnya tindakan atau perbuatan *siri'* itu.

Berkaitan dengan manifestasi *siri'* yang terdiri dari berbagai bentuk itu dengan sifatnya yang kontroversial, maka *siri'* sesungguhnya dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu :

1. Manifestasi perbuatan untuk membela kehormatan demi tegaknya siri' di mata masyarakat.
2. Manifestasi perbuatan yang bertujuan mengembangkan potensi dan mengontrol tingkah laku manusia dalam kehidupannya

Kategori pertama, manifestasi perbuatan siri' itu umumnya menimbulkan korban jiwa dan harta benda dari kedua belah pihak yang terlibat. Kategori ini sering dikatakan manifestasi perbuatan siri' yang bersifat negatif atau destruktif. Alasan pandangan ini berdasarkan korban yang diakibatkan dalam konteks membela kehormatan, disamping penilaian berdasarkan unsur kriminalitas. Sebagai contoh, pelanggaran adat dalam perkawinan.

Dalam sistem perkawinan masyarakat Bugis/Makassar terdapat suatu larangan bentuk perkawinan yang dikenal dengan istilah "silariang" (kawin lari). Terjadinya perkawinan silariang, jika tidak tercapai kesepakatan dari kedua belah pihak orang tua atau wali mereka.

Tidak tercapainya kesepakatan, antara lain disebabkan masing-masing pihak terlalu kokoh dalam tuntutan atau pendirian dalam proses peminangan. Dapat juga disebabkan karena lamarang dari pihak lelaki ditolak tanpa suatu alasan yang kuat, sehingga mengakibatkan harga dirinya (siri') pihak lelaki tersinggung. Bisa juga disebabkan karena keluarga perempuan berasal dari pihak atas, sehingga lamaran ditolak. Pada akhirnya terjadilah perkawinan silariang yang dilarang keras oleh adat.

Pada kategori kedua, berupa manifestasi langsung bagi kehidupan manusia. Berdasarkan siri' yang menjadi faktor pendorong bagi manusia untuk mencapai kejayaan

dalam kehidupannya, manusia dirangsang oleh siri' untuk bersikap dalam perjuangan, ulet dan gigih dalam setiap usaha, jujur dalam kehidupan bermasyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu kategori ini mendatangkan manfaat atau bersifat positif. Dalam kehidupan suku Bugis/ Makassar senantiasa dituntut untuk memelihara siri, karena pada hakekatnya hidup di dunia ini karena adanya siri'.

Siri' adalah harga diri dan kehormatan, tanpa siri' tak ada gunanya mereka hidup di dunia ini. Apabila siri' sudah tak ada, maka manusia tidak lagi memiliki harga diri dan kehormatan.

Dengan demikian, siri' dalam hal ini dengan tegas mengontrol manusia untuk tidak berbuat gegabah yang mengakibatkan timbulnya rasa malu seseorang dan yang dapat berkembang dengan menyentuh harga diri dan kehormatan.

Menurut Mattulada, selain konsep siri' yang menjadi inti dari kebudayaan Bugis/Makassar terdapat tiga lagi sebuah konsep lain yang disebut "Pesse ". Konsep pesse ini mengandung daya dorong yang dapat juga diartikan sebagai suatu solidaritas. Pesse mempunyai unsur solidaritas untuk mempersatukan sikap dan pola tingkah laku suatu kelompok. Mereka dengan ikhlas menderita bersama, berjuang, menikmati hasil, bahkan mereka pun bersedia mati bersama.

Kesusahan yang diderita seseorang akan dihadapi oleh kelompok itu dengan tegas tanpa memperhitungkan akibat-akibatnya. Oleh karena itu, kata pesse ini merupakan kata yang menyertai siri'. Ikrar yang diucapkan pada masyarakat Bugis/Makassar sangat kuat berperan dalam kehidupan kelompok. Tiap-tiap

anggota kelompok akan memelihara ikrar itu sebaik-baiknya, karena mengingkari janji atau ikrar itu, sama artinya dengan mengkhianati janjinya dan orang yang demikian adalah orang yang tidak memelihara siri'nya.

Siri' menjadi sumber panggilan *pesse*, karena siri'lah yang menimbulkan kewajiban masing-masing untuk saling memelihara batas. Di sini terletak aspek kesadaran atau pikiran-pikiran yang memberi batas rasional dari siri' itu. Masing-masing orang sepadan dengan siri'nya. Milik pribadinya dan kepunyaannya dibatasi oleh kesadaran adanya *pesse*, menimbulkan kewajiban untuk kerjasama, saling membantu, setiap kawan dalam lapangan-lapangan pekerjaan yang menyangkut siri' yang bersama-sama mereka miliki dan penghinaan seseorang berarti penghinaan terhadap semua.

C. Etnis Tionghoa di Makassar

Kedatangan orang Cina di beberapa Negeri dinusantara termasuk Makassar, terdorong oleh faktor utama pertama adalah karena bangsa Cina juga sudah lebih awal sebagai sebuah bangsa yang suka berniaga. Kedua, adanya desakan sisa politik dari dalam dirinya yang sedang berkecamuk, terutama pada abad ke-17, saat terjadinya pergeseran kekuasaan di Tiongkok. Dari banyak penelitian diduga bahwa kemungkinan besar orang Tionghoa datang kemakassar sejak kekuasaan Dinasti Yuan (1280-1367), atau mungkin lebih awal dari itu, sebagai sebuah bangsa yang suka berniaga. Yang pasti bahwa mereka datang jauh lebih dahulu daripada orang-orang Eropa (Portugis, Inggris, Belanda, dan lain-lain).

Kedatangan imigran Cina Nusantara seputar Abad ke-17 rata-rata berasal dari Tiongkok selatan terutama dari propinsi Fu Kian dan Kuang Tong. Kedatangan mereka tentu saja tidak hanya membawa barang dagangan atau diri mereka saja akan tetapi juga berbagai aspek kebudayaan yang khas ikut pula terbawa hingga ke Makassar, termasuk sistem perdagangan (ekonomi), bahasa, kepercayaan, teknologi dan sebagainya.

Dari bahasa Cina yang terbesar di Makassar dapat dikenali bahwa mereka berasal dari empat golongan besar.

Koentjaraningrat dalam Shaifuddin (2003) menjelaskan bahwa kelompok tersebut adalah orang yang berbahasa Hok Kian, orang yang berbahasa Hakka (khek), orang yang berbahasa Kanton dan orang yang berbahasa Tio Tjio. Keempat kelompok masyarakat yang berbahasa berbeda ini sulit berkomunikasi antara satu dengan lainnya. Orang Hok Kian adalah kelompok imigran yang pertama bermukim di Makassar dalam jumlah yang cukup besar sampai abad ke-19. Mereka berasal dari Amoy dan sekitarnya (Tsiang Tsu, Tsoan Tsiu, dan sebagainya). Fu Kheien selatan (daerah yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi luar negeri Tiongkok di abad ke-10 sampai 19). Di daerah pedalaman Swatow yang ibu kota kabupatennya disebut Tio Tjoe Foe, dibagian timur propinsi Kuang Tung, orang Hakka, berasal dari pedalaman propinsi Kuang Tong. Selain itu juga bermukim di Makassar orang Cina yang berasal dari Kanton (Kwang Foe) yang berasal dari propinsi Kuang Tung, yang berimigran ke Makassar abad ke-19.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini akan dijelaskan secara mendalam mengenai konflik individual dan kolektif antar etnis Tionghoa dengan Makassar dan faktor-faktor pemicu konflik antar etnis baik dari segi ekonomi, perbedaan identitas kultur, agama dan budaya.

A. Konflik Etnis

Dalam pembahasan ini akan dijelaskan beberapa aspek :

1. Konflik Individu

Sejarah kehadiran orang Tionghoa dapat kita temukan pada babak awal kedatangan mereka di Nusantara. Pada masa itu orang Tionghoa bisa hidup dalam keadaan rukun dan damai dengan masyarakat pribumi. Pada zaman itu terjadi proses akulturasi yang saling memberi dan diberi (*take and give*). Oleh karena kedatangan orang Tionghoa itu ke Nusantara tidak disertai dengan kaum perempuan, maka dengan sendirinya mereka cenderung untuk mengawini penduduk pribumi. Terjadilah perkawinan, yang merupakan salah satu bentuk pembauran.

Masa suka itu berlanjut hingga kedatangan Laksamana Cheng Ho pada sekitar tahun 1407. Pengaruh kehadiran Laksamana Muslim ini di beberapa daerah persinggahannya, misalnya Palembang dan Semarang, amat besar dalam segi pembauran dan pengembangan agama Islam. *Klenteng San Po Kong*, yang sampai

hari ini masih berdiri kukuh di Semarang, merupakan salah satu bukti sejarah betapa di masa lalu pernah terjadi akulturasi budaya antara komunitas Tionghoa dan Jawa, yang berjalan secara aman dan damai. Tidak mengherankan jika beberapa kalangan menyebut Laksamana Cheng Ho sebagai pelopor pembauran.

Hubungan antara etnis Tionghoa dan penduduk Makassar *tempoe doeloe* amatlah erat dan akrab. Itu dimulai sejak orang Tionghoa datang ke Makassar sekitar tahun 1676. Pada masa itu kehidupan ekonomi orang Tionghoa masih sangat sederhana. Banyak di antara mereka bekerja sebagai tukang sepatu, penjual kecap dan pedagang penghubung antara pengusaha pribumi dan orang Eropa. Penampilan ragawi mereka berciri khas topi lebar berujung lancip; menjual kecap dengan menggunakan lonceng. Para wanita Tionghoa berbusana tak jauh beda dengan penduduk setempat, yakni mengenakan kebaya di banyak kesempatan.

Menjelang akhir abad ke-19, jumlah orang Tionghoa di Makassar sudah mencapai 500 orang. Mereka memiliki pemimpin yang berdarah bangsawan dinasti Tung. Suasana akrab antara orang Tionghoa dan orang Makassar itu akan sangat tampak pada tahun baru Imlek. Perayaan ini disambut dengan sukacita oleh kedua kelompok etnis yang berbeda itu.

Kerenggangan antara orang Tionghoa dan orang Makassar mulai tumbuh tatkala /pemerintah kolonial Belanda membagi penduduk ke dalam tiga kategori : 1) Belanda, 2) pribumi, dan 3) Timur asing (Tionghoa, Arab dan India). Orang-orang yang dikategorikan dalam kelompok Timur asing mendapat lebih banyak kemudahan dari pihak pemerintah kolonial Belanda. Mereka diperkenankan untuk menguasai dan

membeli tanah orang pribumi. Anak-anak Tionghoa disekolahkan di sekolah yang khusus diperuntukkan bagi mereka, yakni Chinese Lagere School, yang berbahasa pengantar bahasa Belanda. Inilah salah satu titik awal tumbuhnya suasana diskriminatif di Indonesia.

Untuk sementara bisa kita simpulkan bahwa sesungguhnya akar diskriminasi terhadap kelompok etnik di Indonesia ini merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda. Pada babak lain dari sejarah Indonesia kita menyaksikan bagaimana pemerintah kolonial Belanda, yang semula dianggap 'memanjakan' orang Tionghoa', ternyata memperlakukan orang Tionghoa dengan sangat kejam. Peristiwa pembantaian pada tahun 1740, yang menelan korban jiwa ribuan orang Tionghoa, tentu akan tetap tersimpan dalam ingatan setiap orang yang memahami sejarah.

Warisan buruk yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda seperti itulah yang rupanya dilanjutkan oleh pemerintah kita pasca kemerdekaan, terutama pada masa pemerintahan Presiden Soeharto selama kurang lebih 33 tahun. Siapa pun yang masih memiliki hati nurani tentunya merasa sedih menyaksikan perlakuan diskriminatif, pembakaran rumah, pembunuhan dan pemerkosaan terhadap etnis Tionghoa, seperti yang terjadi pada bulan Mei 1998.

Dari ketegangan situasi yang memanas terjadi di Makassar akibat dari ketegangan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang terjadi di Makassar pada tanggal 10 Mei 2006²². Kasus ini dipicu oleh kematian Hasniati Alias Ati, salah satu PRT asal Sinjai. Korban meninggal karena diduga dianiaya majikannya, Wendy

²² Lihat fajar Edisi 10 Mei 2006

Tandiawan (24) warga Jl. G. Latimojong A No. 8. Wandy berdalih bahwa korban meninggal dunia akibat jatuh dari tangga rumahnya. Penganiayaan itu bermula dari kekesalan Wandy, anak majikannya terhadap kedua pembantunya yang disebut-sebut memecahkan kaca.

Dari kasus ini, beberapa ruas jalan sempat ditutup untuk sementara karena senternya isu SARA terkait kasus ini. Tak hanya itu, di beberapa kampus berlangsung orasi mahasiswa mengecam peristiwa meninggalnya pembantu rumah tangga akibat dianiaya majikannya. Bahkan beberapa mahasiswa sempat melakukan sweeping terhadap warga keturunan yang melintasi di depan kampus mereka. Tetapi akhir sweeping itu cepat di atasi petugas sehingga hal-hal negatif bisa terhindarkan. Akibat ulah Wandy, warga keturunan di Makassar was-was dan ketakutan. Mereka yang tak berdosa, ikut terbawa-bawa akibat kasus itu. Terlebih lagi setelah adanya instruksi dari petugas yang menghimbau warga keturunan agar tidak keluar rumah.

2. Konflik Kelompok

Kasus PRT asal Sinjai itu kemudian banyak menuai protes dan tanggapan dari banyak pihak, bahwa konflik yang terjadi agar tidak menggenalisasikan salah satu etnis. Karena sesungguhnya kasus ini hanya kesalahan perorangan yang berujung konflik etnis. Emosi kedaerahan (asal PRT) diduga potensial menimbulkan efek gerak massa. Masalah sosial yang terjadi ini mampu menjadi isu politik yang hangat bagi orang-orang yang tidak bertanggung jawab menjadikannya sebagai kasus krusial entah dari orang dengan etnik yang sama (korban), atau berasa sama dari kelompok pribumi.

Masalah ini terkait dengan keberadaan etnik, fungsi etnik ditinjau pada dua hal pokok, yaitu secara internal dan eksternal²³. Secara internal etnik menjaga integrasi, memperkokoh, dan menjaga kesinambungan budaya suatu kelompok. Hal itu dapat terjadi karena di dalam kelompok etnik terdapat jaringan hubungan persoalan yang padat yang sebagian besar didasarkan pada kekerabatan dan pada kontak langsung, tatapan muka yang terjadi pada sebuah komunitas. Nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok etnik itu sebagai bagian tidak tertulis, dan individu diikat satu dengan yang lain dalam jaringan ketergantungan.

Secara eksternal etnik dipandang secara intrinsik merupakan sumber potensi yang sangat efektif dalam menggerakkan massa (mobilisasi) untuk mengalkan integrasi sosial. Dalam hal ini etnik menjadi penegas identitas kelompok "kita" dan "mereka". Kelompok "kita" dibenarkan dan kelompok "mereka" diperkaburkan. Identitas "kita", "mereka" yang membutuhkan legitimasi, dan dikembangkan dalam narasi besar dan diperkukuhkan dalam bentuk-bentuk ekspresi etnik seperti kekhasan nama, bahasa dan dialek mereka. Fungsi etnik seperti itu, dan ekspresi yang menopangnya berlangsung dengan cara, misalnya dengan menghadirkan (invented) atau menunjukkan situasi-situasi khusus di mana penggunaan etnik dibenarkan.

Berdasarkan fungsi etnik tersebut James McKay mengidentifikasi dua pendekatan bentuk kelompok etnik²⁴, yaitu mobilisasi dan primordial; Pertama; dalam pendekatan mobilisasi melihat secara alamiah, bahwa tidak dapat dihindarkan

²³ Lihat Makalah Gustiana A Kambo. Hal 59

²⁴ Mc. Kay, (dalam Makalah Gustiana A Kambo) Hal. 60

keberadaan etnisitas. Identitas etnik diciptakan secara aktif, dipelihara, diberi penguatan oleh individu dan kelompok agar mendapatkan akses sosial, politik dan sumber daya mental. Orang menggunakan simbol identitas untuk mencapai tujuannya, dan kelompok etnik cenderung dibentuk ketika orang percaya mereka dapat keuntungan oleh pembentukan identitas etniknya. Contoh di Asian Selatan atau AfroCaribbeans di Inggris yang mengembangkan identitas etnik dengan menawarkan dukungan emosional dan praktis para anggota kelompok etnik dalam kemakmuran agar terjadi perubahan dalam hukum dan politik yang dapat memperkuat kekuasaan etniknya.

Menurut McKay pendekatan ini memiliki keterbatasan, yakni cenderung memandang rendah kekuatan emosional ikatan etnik dan diasumsikan bahwa etnisitas selalu berkaitan dengan perasaan bersama yang ingin dikejar kelompok etnik. Dia menyatakan bahwa beberapa fakta kelompok etnik mengejar ketertarikan politik dan ekonomi, dan bukan berarti semua kelompok etnik memiliki tujuan yang sama.

Selanjutnya McKay mengasumsikan bahwa pendekatan ini terkadang sulit dibedakan dengan arti kelas dan stratifikasi etnik, kedua pandangan ini menurutnya agak berbeda. Etnisitas masuk pada bagian kepentingan kelas dan memiliki lintas batas kelas, seperti di Irlandia Utara, Afrika Selatan dan Libanon, konflik etnik sering terjadi daripada konflik kelas dan orang sering mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok etnik daripada kelompok kelas.

Kedua, pendekatan primordial digunakan pertama kali oleh Shils seorang sosiolog, Amerika tahun 1957. Shils menyatakan bahwa seseorang dapat memiliki

atribut primordial dalam wilayahnya atau berdasarkan asal mereka, agama dan keluarganya. Atribut ini memasuki perasaan yang kuat pada loyalitas, intensitas dan solidaritas kelompok. Atribut etnik primordial dapat saja berakar pada kelompoknya dan menjadi basis konflik antara kelompok etnik dalam waktu lama.

Keterikatan antar etnis yang mengakar pada manusia sebagai individu sosial, mampu memberikan efek positif dan negatif. Adanya efek tersebut bergantung pada fenomena yang terjadi. Sehingga bisa dikatakan hal yang wajar ketika seorang dari komunitas mereka diganggu / dimusnahkan maka individu yang lain bergerak secara anarkis. Hal ini untuk mempertahankan kelangsungan kelompoknya dan sebuah pengakuan harga diri. Yang menjadi masalah ketika logika dan peran aparat keamanan sudah tidak diperhitungkan.

Etnis Tionghoa di Kota Makassar menjadi kebingungan dengan tindakan massa. Bagi mereka, individu yang melakukan kesalahan (tidak kriminal) di Kota Makassar, secara bijak haruslah dituntut secara hukum yang berlaku. Atribut bahwa hanya karena ia seorang Tionghoa kemudian menggeneralisasi bahwa semua etnis Tionghoa di Makassar sama (stereotype). Padahal kenyataannya interaksi yang terjadi di sebagian kota Makassar banyak juga etnis Tionghoa yang membantu roda perekonomian.

Konflik yang terjadi di banyak kota di Indonesia yang bersinggungan dengan etnis Tionghoa. Berawal dari individu yang kemudian berkembang menjadi konflik kelompok. Padahal, bila ada warga Tionghoa yang terlibat, harusnya mereka saja diproses melalui jalur hukum jangka menghukum seluruh warga Tionghoa karena

tidak semuanya mereka terlibat dalam peristiwa tersebut. Karena adanya yang ingin memanfaatkan peristiwa ini agar suasana menjadi mencekam.

B. Faktor-faktor Pemicu Konflik Antar etnis

Dalam studi kasus konflik antar etnis, banyak hal yang bisa menjadi indikator seperti terjadinya konflik antar etnis secara individu maupun kolektif di kota Makassar disebabkan oleh beberapa faktor. Berikut ini adalah faktor-faktor pemicu konflik, yaitu:

1. Ekonomi

Setelah 61 tahun kemerdekaan Indonesia konflik rasial masalah persinggungan etnis Tionghoa – Pribumi meliputi suku-suku asli yang ada di daerah setempat secara umum telah terakumulasi di kota di Indonesia tentu saja dengan pola dan tipe permasalahan yang berbeda dan bermacam ragam pula sebab akibatnya. Selama Orde Baru etnis Tionghoa oleh pemerintah yang berkuasa hanya diberikan kebebasan hak di bidang usaha perekonomian dan jasa, dengan dukungan penuh sarana dan prasarana infrastruktur pemerintah, sehingga melahirkan segelintir (sekitar 200 orang) bila dibandingkan dengan jutaan pengusaha UKM dan pengusaha kecil sehingga mencuatkan kecemburuan dan melahirkan kesenjangan sosial.

Kesenjangan terjadi dimana orang Tionghoa diberi hak istimewa oleh pemerintah Hindia Belanda seperti hak untuk memonopoli penjualan candu, menjadi pedagang perantara dan hak untuk memungut pajak. Namun, setelah bangsa penjajah tersebut hengkang dari republik ini, pernah ada upaya yang dilakukan oleh pemerintah orde lama untuk menggenjot pengusaha pribumi dengan cara memberi

mereka izin untuk mendapatkan lisensi dan kredit impor agar supaya mereka dapat menekan pengusaha Tionghoa lewat program Benteng. Akan tetapi sayangnya, kebijakan pemerintah ini dinilai kurang berhasil sebab ternyata mereka kurang mampu mengelola fasilitas ini dengan baik. Malahan pada umumnya yang mengelola usaha tersebut adalah kaum minoritas Tionghoa sehingga muncullah istilah yang mengandung konotasi negatif *Ali-Baba* yang mengacu pada adanya kolusi antara kelompok *Ali (penguasa pribumi)* dan kaum *Baba (pengusaha Tionghoa)*.

Pada masa pemerintahan orde baru perkembangannya ternyata menjadi lain yang mana ruang politik golongan minoritas Tionghoa amat dibatasi. Namun harus pula diakui, kalau kelompok ini tetap tumbuh sebagai salah satu kekuatan ekonomi yang patut diperhitungkan. Soal benar tidaknya adanya fasilitas dan perlakuan istimewa yang diberikan oleh pemerintah orde baru terhadap golongan ini, tentu harus dibuktikan melalui penelitian empirik, ilmiah dan objektif. Yang jelas, dalam berbagai referensi dapat ditemui adanya sejumlah pendapat yang mengatakan bahwa selama masa pemerintahan orde baru, tumbuh suatu model ekonomi politik cukong yang berakibat pada semakin lebarnya kesenjangan sosial ekonomi antara pribumi dan Tionghoa. Akibatnya, timbullah kecemburuan sosial yang kemudian menjadi pemicu lahirnya rasa curiga dan perasaan benci walau kadang-kadang bersifat laten terhadap golongan minoritas ini. Itu pula sebabnya tidak mengherankan apabila dikatakan salah satu sumber munculnya stereotip dan prasangka atau bahkan perasaan anti Tionghoa adalah terletak pada adanya kompetisi dalam bidang ekonomi antara pribumi dan non pribumi selain disebabkan oleh adanya perbedaan kepercayaan dan

kultur, adanya golongan tertentu yang terkesan hidup eksklusif dan memiliki nasionalisme yang diragukan, masih kentalnya sifat ethnosentrisme dan menganggap budaya sendiri lebih unggul pada satu sisi dan sementara pada sisi lain kebudayaan masyarakat lain dipandang lebih inferior.

Dari hasil wawancara bersama *Ketua Perhubungan dagang Indonesia Tiongkok* Bapak Halim Homarik²⁵ bahwa kesenjangan ekonomi antara orang Tionghoa dan etnis Makassar, memang harus diakui orang Tionghoa pada masa itu mereka suka bekerja keras dan tidak boros, sehingga kedudukan ekonominya cepat menanjak. Kecenderungan semacam ini masih bisa kita temukan hingga dewasa ini. Oleh karena itu, sebagian orang melakukan perampatan (generalisasi) bahwa semua orang Tionghoa adalah orang kaya. Pandangan ini tentu kurang memiliki dasar yang kuat. Kenyataannya masih ada etnis Tionghoa yang taraf hidupnya masih dibawah standar seperti didaerah Singkawang Pontianak.

Menurut *Dosen psikologi komunikasi Fisip Unhas* Dr. Jeanny Maria Fatimah²⁶, sesuai dengan teori interaksi sosial bahwa setiap orang atau individu membutuhkan individu lain. Demikian juga etnik Tionghoa membutuhkan etnik makassar dan demikian juga sebaliknya. Karena sifat setiap individu itu membutuhkan, bantuan, pertolongan dari orang lain entah itu kapan. Setiap orang saling membutuhkan dalam hidup bermasyarakat.

²⁵ Halim Homarik. Wawancara. 23 Maret 2007 Alamat Jln Gunung Merapi toko Elco

²⁶ Jeni Maria Fatimah. Hilangkan prasangka dan stereotype lewat interaksi. 27 Januari 2007. Lihat [www. Google.Co.Id](http://www.Google.Co.Id)

Di Kota Makassar , etnis Tionghoa banyak berperan dibidang ekonomi khususnya perdagangan. Mereka memiliki andil dalam pembangunan. Konflik yang menjurus pada SARA yang terjadi di Makassar mengakibatkan roda perekonomian nyaris lumpuh padahal sebenarnya, kedua etnik ini memiliki keinginan untuk saling berinteraksi.

2. Perbedaan Etnis

“Orang Cina” kalimat itu masih sering terdengar saat kita melihat orang cina melewati kantong-kantong perkampungan masyarakat di Kota Makassar. Tak salah jika masyarakat Tionghoa masih merasa terisolasi dengan masyarakat lainnya. Seperti makhluk asing yang sering disebut “Baba Cinayya”.

Andjarwati Noordjanah (2004) dalam bukunya "Komunitas Tionghoa di Surabaya"²⁷ menengarai bahwa diskriminasi terhadap etnis Tionghoa hingga kini masih menggejala dan dalam benak penduduk "pribumi" masih tersimpan stereotip yang memang “sengaja” dibuat sejak berabad-abad silam. Sejarah mencatat, peristiwa-peristiwa politis dan diskriminatif yang terjadi di negeri ini, mulai dimasa sebelum kemerdekaan hingga reformasi 1998 selalu menyeret kelompok komunitas ini sebagai korban.

Masih segar dalam ingatan kita, beberapa tahun terakhir, di Makassar diskriminasi etnis Tionghoa masih terus terjadi. Mulai dari diskriminasi oleh pemerintah kota dengan adanya pemberlakuan kebijakan “tidak adil” yaitu Surat

²⁷ Andjarwati Noordjanah (Dalam Choirul Mahfud). Komunikasi tionghoa di Surabaya 16 Desember 2006

Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) dalam urusan publik, hingga diskriminasi dalam berpolitik.

Dalam berpolitik, misalnya hingga kini alasan warga etnis Tionghoa tidak barhak terjun ke dunia politik bukan karena warga etnis Tionghoa tidak mau berpolitik. namun akibat sistem yang diskriminatif lah yang sesungguhnya membuat etnis ini tidak bisa terjun "*bebas*". Tidak saja dalam konteks politik nasional tetapi juga lokal. seperti Pilkada. Dalam pilkada di Surabaya kemarin misalnya sangat tampak warga etnis Tionghoa masih takut dalam berpolitik. Karena, perasaan was-was masih terus menghantui warga etnis ini.

Kalau ditilik secara historis. citra negatif dan "pahit" terhadap etnis Tionghoa memiliki akar yang panjang. Menurut Asvi Warman Adam. peneliti sejarah LIPI, secara historis. sejak masa sebelum kedatangan bangsa Eropa, terutama pada masa kolonial. Masalah China (*Chineesche Kwestie*) baru menghangat di koloni ini sejak 1900-an ketika timbul gerakan nasionalisme kaum peranakan China di Indonesia. Pada 17 Maret 1900, di Batavia dibentuk Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang kemudian mendirikan sekolah-sekolah (berjumlah 54 buah pada 1908 dan mencapai 450 sekolah pada 1934).

Pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu makin khawatir. Sebab, pada bulan Januari 1912 Sun Yat Sen memproklamasikan Republik Rakyat Tiongkok. Yakni, organisasi Tionghoa yang awalnya berkecimpung dalam bidang sosial-budaya mulai mengarah ke politik. Tujuannya, menghapuskan perlakuan diskriminatif terhadap orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dalam bidang pendidikan,

hukum/peradilan, status sipil, beban pajak, hambatan bergerak, serta bertempat tinggal (Aswi).

Dalam rangka pelaksanaan politik etis, pemerintah kolonial berusaha memajukan pendidikan. Namun, warga Tionghoa tidak diikutkan dalam program tersebut. Padahal, orang Tionghoa membayar pajak ganda (pajak penghasilan dan pajak kekayaan). Pajak penghasilan diwajibkan kepada warga pribumi yang bukan petani. Pajak kekayaan (rumah, kuda, kereta, kendaraan bermotor, dan peralatan rumah tangga) dikenakan hanya bagi orang Eropa dan Timur Asing termasuk orang etnis Tionghoa. Hambatan untuk bergerak dikenakan bagi warga Tionghoa dengan adanya *passenstelsel*. Sejak pembantaian Tionghoa di Batavia pada 1740, orang Tionghoa tidak dibolehkan bermukim di sembarang tempat. Aturan *wijkenstelsel* itu menciptakan permukiman etnis Tionghoa di sejumlah kota besar di Hindia Belanda.

Target pemerintah kolonial untuk mencegah interaksi pribumi dengan etnis Tionghoa melalui aturan "*passenstelsel*" dan "*wijkenstelsel*" itu ternyata mempunyai hikmah. Yakni, menciptakan konsentrasi kegiatan ekonomi orang Tionghoa di perkotaan. Ketika perekonomian dunia beralih ke sektor industri, orang-orang Tionghoa tersebut paling slap dengan spesialisasi usaha makanan-minuman, jamu, peralatan rumah tangga, bahan bangunan, pemintalan, batik, kretek, serta transportasi.

Kemudian, sejak 1981, warga Tionghoa didiskriminasi dalam mencari pekerjaan. Sebagaimana termaktub dalam Instruksi Mendagri Amir Machmud No 32/1981 tentang pembinaan dan pengawasan eks tapol/napol G 30 S/PKI melarang para eks tapol/napol itu bekerja sebagai ABRI atau PNS. Warga Tionghoa juga

dilarang menjadi anggota parpol, pers, dalang, lurah, lembaga bantuan hukum, dan pendeta. Selain itu, para keluarga (anak-keponakan, bahkan cucu) yang bekerja di pemerintahan dikenal litsus (penelitian khusus) dan harus bersih lingkungan. Parahnya lagi, perlakuan diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tapi juga perusahaan swasta dan sebagian masyarakat "pribumi".

Apalagi, Indonesia pernah mengalami masa kelam di mana banyak kalangan yang kemudian menjustifikasi bahwa orang cina adalah komunis / PKI. Kasus G30 S/PKI membuat banyak masyarakat yang menganggap bahwa orang cina itu adalah PKI, sehingga mereka enggan bergaul dengan komunitas Tionghoa. Stereotipe seperti itu terjadi, juga karena kebijakan pemerintah yang membedakan antara masyarakat pribumi dan bukan pribumi. Generalisasi inilah yang kemudian menjadi sebuah identitas bagi etnis Tionghoa.

Studi identitas lahir dari pemikiran Friedrich Hegel seorang filosofi Jerman, pemikirannya mendorong gerakan revolusioner di Perancis. Salah satu karyanya yang mendukung studi ini adalah *The Phenomenology of Mind*. Karya tersebut yang mempengaruhi pikiran Marx tentang pertentangan kelas. Hal itu menyebabkan interdependensi identitas, yang belakangan ini disebut dengan pengakuan politik. Pengaruh Marx memperkuat bahwa identitas merupakan salah satu bagian dari teori sosial.²⁸

Dalam perkembangan selanjutnya identitas menjadi pedoman dalam melakukan interaksi-interaksi sosial, baik dalam masyarakat heterogen maupun

²⁸ Marx. On The Jewish Question, 1843 (Dalam Makalah Gustiana A Kambo)Hal 29

homogen. Dalam masyarakat yang homogen jarang ditemukan adanya identitas tunggal. Akan tetapi, biasanya orang-orang mengidentifikasikan diri mereka dengan nilai-nilai dari pelbagai kelompok yang berbeda.

Pada dasarnya, karakter individu berakar pada identitas dasar semenjak lahir seperti suatu anugrah yang tidak bisa dihindari. Identitas dasar itulah yang kemudian membentuk "*keakuan*" dan membedakannya dengan yang lain (kamu, mereka dan dia). Hakikat dasar itu maupun kelompok tercermin dan terbentuk dari unsur yang melekat atau sengaja dilekatkan pada tubuh atau diri sang bayi ketika lahir.

Dalam faktor eksternal dapat diidentifikasi bagaimana orang lain melihat dan beraksi terhadap diri kita. Hal itu dapat menjadi sebuah pertentangan dan merusak, atau dapat mendukung dan memperkuat pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Artinya bahwa, munculnya identitas berasal dari hubungan antara diri kita dengan orang lain. Jenkins menyebutkan bahwa definisi eksternal anda terhadap saya sebagai bagian dari definisi internalku dari diriku dan definisi anda terhadap diri anda sendiri. Proses keduanya terwujud dalam rutinitas sehari-hari dari individu. Yang satu tidaklah lebih baik dari yang lain.

Menurut Budayawan asal Sulawesi Selatan, Shaifuddin Bahrum²⁹ bahwa pada dasarnya pemuda Cina juga sangat menginginkan untuk bergaul dengan pemuda pribumi lainnya. Hanya saja, karena ketakutan tidak akan diterima di lingkungan pribumi, membuat mereka enggan dan memilih bergaul di kelompoknya semata.

²⁹ Shaifuddin Bahrum. Dari dialog integrasi budaya masyarakat tionghoa di Makassar. 8 Februari 2006 lihat www.Google.co.id.

Menurutnya pula, sama halnya dengan perkawinan. Orang Cina dikatakan tidak mau kawin dengan orang Bugis-Makassar. Pada dasarnya mereka juga mau, hanya sejak tidak ada orang Bugis yang pergi melamar anak mereka.

3. Agama

Dalam pasal 29 UUD 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Maka dari itu, penganut Kong Hu Cu di Indonesia oleh etnis Tionghoa tidak ragu untuk menjalankan ibadah menurut ajaran agama yang diyakininya. Ajaran Khong Hu Cu mendorong umatnya memegang teguh akhlak yang mulia serta menekankan agar bersikap jujur, ikhlas dan mementingkan orang banyak.

Dari pembauran yang sudah ada kini etnis Tionghoa tidak hanya penganut Khong Hu Cu tetapi ada juga yang beragama Kristen, Katolik, bahkan Islam. Sampai saat ini pemeluk agama antar etnis itu sendiri tidak pernah menjadikannya sebagai sebuah masalah besar karena keluar dari ajaran nenek moyang mereka. Bahkan etnis di luar mereka sajalah yang menganggap mereka asing.

Tatkala RUU Kewarganegaraan disahkan pada 11 Juli 2006 di gedung DPR untuk menggantikan UU Kewarganegaraan lama nomor 62/1958, yang telah berusia hampir lima puluh tahun, para warga negara keturunan asing menyambutnya dengan penuh keharuan dan kegembiraan. Para tokoh dan kelompok masyarakat di pelbagai daerah Indonesia, baik dari kalangan yang selama ini diistilahkan dengan pribumi maupun nonpribumi, memberikan sambutan yang mabajik (positif).

Hal ini bisa dimaklumi karena itulah saat yang sekian lama dinanti-nantikan semua orang Indonesia yang menghayati dan menyadari sedalam-dalamnya makna keindonesiaan, khususnya oleh warga negara Indonesia nonpribumi. Saat itu, oleh beberapa kalangan, dinyatakan sebagai akhir masa diskriminasi bagi para warga negara Indonesia nonpribumi. Bagi penduduk dari kalangan etnik Tionghoa, yang jumlahnya terbesar dalam klasifikasi warga negara Indonesia nonpribumi tersebut, tentulah undang-undang kewarganegaraan tersebut disambut dengan penuh sukacita.

Konflik antara etnis Tionghoa dengan etnis Makassar yang pernah terjadi bukan akibat perbedaan agama. Kesenjangan social antara kedua etnis inilah yang seringkali menjadi pemicu konflik . Peran agama sendiri adalah sebagai peredam konflik. Dari hasil wawancara dengan *Ketua Perhimpunan Islam Tionghoa (PITI)* Bapak Sulaiman Gosalam³⁰ yang juga menjabat Dosen Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Ketika terjadi konflik letak titik kesalahan ada pada kedua etnis yang bertikai, dimana pemicunya adalah ; pertama, kurangnya pemahaman hukum, kedua adanya trauma sejarah yang mengeneral.

Langkah-langkah konkrit PITI sebagai organisasi Islam adalah menjembatani pemahaman etnis Tionghoa mengenai ajaran Islam dimana mereka akan lebih terbuka memperkenalkan Islam dengan tidak melihat Islam dari segi individunya.

4. Budaya

Akan selalu ada benang merah antara komunikasi dengan budaya. Untuk itu sangatlah penting dipahami bahwa komunikasi yang terjalin antara dua budaya yang

³⁰ Sulaiman Gosalam. Wawancara tgl 2 Mei 2007

berbeda tentu akan menimbulkan konflik apabila orang-orang yang melakukan komunikasi didalamnya tidak dapat meminimalisir perbedaan budaya masing-masing didalamnya. Jangankan untuk berbeda budaya, bahkan komunikasi yang dilatar belakangi dengan kesamaan budaya saja masih menimbulkan konflik didalamnya, apalagi sudah berbeda latar belakang budaya tentunya akan menimbulkan banyak konflik didalamnya.

Perbedaan latar belakang budaya dalam melakukan komunikasi akan menimbulkan konflik, dan konflik tersebut akan semakin diperkeruh dengan adanya prasangka yang mengalir menjadi stereotipe yang berkembang pada masing-masing orang.

Ada beberapa hal yang harus dipenuhi individu untuk berkomunikasi secara efektif antar budaya adalah :

1. Menghormati kebudayaan lain sebagai manusia, dengan banyak sifat dan keinginan yang sama. Mereka harus melihat satu sama lain lebih dari sekedar dua orang yang berbeda budaya. Mereka harus melihat satu sama lain sebagai orang yang mempunyai nama dan sejarah kehidupan kepribadian, harapan dan ketakutan dan barang kali beberapa orang yang mencintainya.
2. Menghormati budaya lain apa adanya, bukan sebagaimana yang kita kehendaki. Sebuah budaya adalah cara hidup yang telah dijalankan orang sehingga mereka dapat hidup menurut kehendak mereka.

3. Menghormati hak anggota budaya lain untuk bertindak berbeda dari cara kita bertindak.

Budaya akan berpengaruh pada seseorang karena budaya merupakan cara dan aturan seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam memandang budaya di luar budaya kita sendiri akan tergantung dari bagaimana seseorang mempunyai sikap terhadap budaya di luar budayanya. Setiap kali kita berhadapan dengan objek, peristiwa, gagasan dan ide, atau bahkan orang tertentu, maka kita akan mempunyai sikap tertentu, dan dalam sikap itu berisi pula prasangka terhadap objek. Sikap adalah kecenderungan untuk mengevaluasi sesuatu, gagasan, peristiwa, seseorang atau sekelompok orang pada suatu skala, mulai dari yang paling menyenangkan sampai pada yang paling tidak menyenangkan.

Penggayangan etnis Tionghoa adalah isu yang dimainkan kelompok-kelompok tertentu. Hal itu diperparah dengan kondisi politik dengan berlakunya PP No. 10 Tahun 1997 tentang status kewarganegaraan tunggal, yang jelas membatasi gerak-gerik masyarakat etnis Tionghoa. Penghapusan PP oleh mantan Presiden RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), barulah komunitas Tionghoa berkembang dengan merayakan acara-acara keagamaannya maupun budaya yang dimiliki secara terbuka. Kondisi itu juga membuka interaksi baru dengan masyarakat pribumi lainnya.

Dari adanya PP itu kini masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan dalam menjalankan budaya seperti Imlek dan Cap Go Meh, bahkan dijadikan sebagai libur nasional, oleh pemerintah. Dimana sebelumnya pada masa Orde Baru perayaan ini sangat dilarang keras.

IMLEK atau Sin Tjia adalah sebuah perayaan yang dilakukan oleh para petani di Tiongkok yang biasanya jatuh pada tanggal satu di bulan pertama di awal tahun baru. Warga Tionghoa yang lebih banyak menganut Khonghucu di Sulawesi Selatan, juga merayakan tradisi ini hingga sekarang. Perayaan hari raya Imlek sendiri baru dilaksanakan secara umum ketika pertengahan tahun 90-an, pada waktu pemerintah mulai membuka "keran" pembauran etnis Tionghoa dan suku lainnya. Walau terbilang masih asing saat itu, budaya ini sudah mulai dirasakan masyarakat secara umum. Dan sekarang, Imlek sudah bukan milik warga Tionghoa saja, tapi sudah seperti milik masyarakat.

Warga Tionghoa baru benar-benar merasakan apa makna Imlek ketika seluruh masyarakat sudah mulai ikut serta bersama-sama merayakan tahun baru ini (2007). Imlek sudah dirasakan seperti Tahun Baru lainnya, yaitu terjadi silaturahmi antara masyarakat dengan warga Tionghoa. Dalam silaturahmi itu, juga terjadi pembauran dengan tidak mempertentangkan darimana asal masing-masing. Dalam perayaan itu, terjadi hubungan yang baik antara warga Tionghoa dan masyarakat umum. Dan hal seperti itulah juga diharapkan oleh etnis Tionghoa. Sesama anak bangsa, tidak ada lagi sekat atau pengkotak-kotakan, siapa anda darimana asalnya. Oleh karena itu, sangat diharapkan, agar seluruh nuansa yang berbau SARA bisa ditepis dalam pergaulan masyarakat.

C. Mengelolah Konflik Fungsional Pada Tingkat Individu dan Kelompok

Dalam bukunya yang berjudul "Conflict dan The Web of Group-Affiliations (1995)", Simmel³¹ berusaha untuk mengembangkan teori-teori yang dilandaskan pada bentuk-bentuk dasar proses sosial yang dikenal dengan pendekatan *sosiologi formal*. Simmel memandang konflik sebagai gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat. Struktur sosial dilihatnya sebagai gejala yang mencakup berbagai proses asosiatif dan disosiatif yang tidak mungkin dipisah-pisahkan namun dapat dibedakan dalam analisa. Konflik dapat menjadi penyebab atau pengubah kepentingan kelompok-kelompok, organisasi-organisasi, kesatuan-kesatuan dan lain sebagainya. Dalam kenyataannya, faktor-faktor disosiatif seperti kebencian, kecemburuan, dan lain sebagainya, memang merupakan penyebab terjadinya konflik. Dengan demikian, konflik ada untuk mengatasi berbagai dualisme yang berbeda, walaupun dengan cara meniadakan salah satu pihak yang bersaing

Konflik berfungsi mengatasi ketegangan antara hal-hal yang bertentangan dan mencapai kedamaian. Hal itu hanya merupakan salah satu ekspresi hakikatnya, yakni sintesa unsur-unsur yang saling bertentangan. Hakikat ini akan tampak lebih jelas lagi apabila disadari bahwa bentuk-bentuk hubungan anti tesis dan konfergen secara fundamental dibedakan antara dua orang atau kelompok, ataupun lebih. Konflik tersebut, yang sebenarnya merupakan sikap tindak masa bodoh, bersifat negatif, sedangkan konflik mempunyai ciri positif. Dalam konflik, ciri positif dan negatif

³¹ Georg Simmel. Akar konflik sepanjang zaman. 2004 hal 135

terintegrasi, ciri-ciri itu dapat dipisahkan secara konseptual, namun tidak secara empiris.

Peranan positif dan integratif dari antagonisme terbukti dari adanya struktur-struktur yang dilandaskan pada pemisah kelas-kelas sosial yang tegas, sebagaimana halnya dalam masyarakat berkasta. Masyarakat semacam itu tidak hanya dilandaskan pada peringkat kelas-kelas sosial, akan tetapi pada proses bahwa kelas-kelas sosial tersebut saling menolak. Disamping itu, secara sosiologis kelas-kelas sosial yang tersusun secara hirarkis itu menimbulkan posisi resiprokal.

Lebih lanjut Simmen mengatakan, apabila seseorang menjadi lawan rekannya, maka hal itu tidak harus merupakan faktor sosial yang negatif murni, walaupun mungkin akibatnya tidak menyenangkan bagi pihak lain. Kadang-kadang manusia memang harus berinteraksi dengan orang lain yang mempunyai sikap-sikap yang kurang menyenangkan. Oposisi berarti tidak hanya merupakan sarana untuk mempertahankan hubungan, akan tetapi juga merupakan salah satu fungsi konkret hubungan tersebut. Apabila hubungan tersebut murni bersifat eksternal dan signifikansi praktikalnya kecil, fungsi itu hanyalah dapat dipenuhi oleh pertikaian dalam bentuk yang laten, yakni kebencian. Tanpa ada kebencian, tidak dapat dibayangkan bagaimana kehidupan di kota yang modern dapat terjadi, dan dalam kehidupan sehari-hari terjadi hubungan dengan berbagai pihak yang tidak terhitung banyaknya.

Ada pertikaian yang tanpanya mengenyampingkan semua unsur, misalnya, apabila terjadi perkelahian antara perampok dengan korbannya. Apabila perkelahian

itu bertujuan untuk membunuh atau menghancurkan pihak lain, maka sama sekali tidak ada unsur-unsur pemersatu. Namun apabila ada pembatas terhadap pemberlakuan kekerasan, maka ada faktor kerjasama, walaupun hanya sebagai satu kualifikasi dalam kekerasan.

Konflik yang terjadi sebenarnya berlangsung dengan suatu harapan bahwa antagonisme akan berhenti apabila mencapai taraf tertentu, karena kesadaran bahwa hal itu tidak ada manfaatnya atau karena kejenuhan berkelahi secara empiris dan rasional, manusia sebenarnya merupakan makhluk egoistis. Permusuhan secara alamiah berpasangan dengan simpati. Perhatian manusia terhadap penderitaan pihak lain hanya dapat dijelaskan berdasarkan motivasi-motivasi tertentu hal itu juga dapat dijelaskan dari sudut adanya antipati dalam diri manusia yang disebut sebagai semangat kontradiktif.

Dalam kenyatannya memang lebih sulit untuk menanamkan simpati daripada permusuhan. Hal itu dilandaskan pada lebih mudahnya menanamkan kecurigaan terhadap pihak ketiga, daripada menanamkan kepercayaan. Perbedaan itu semakin nyata kalau sudah terdapat prasangka, apalagi yang sudah mencapai taraf yang relatif mendalam. Pada taraf lanjutan tersebut akan diterapkan hal-hal yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang dilakuka secara sadar. Fakta yang sama terjadi apabila ada pihak-pihak yang mempergunakan prasangka tadi untuk maksud-maksud yang lebih buruk lagi.

Kiranya sulit untuk menyangkal akan adanya naluri untuk berkelahi yang bersifat *ap riori* manusia kadang-kadang memerlukan penyaluran rasa benci dan

keinginan untuk berkelahi. Kebutuhan-kebutuhan itu kemudian menimbulkan kualitas-kualitas provokatif untuk kebencian. Memang pada awal perkembangan kebudayaan, peperangan merupakan satu-satunya upaya interaksi dengan kelompok-kelompok asing, oleh karena belum berkembangnya komunikasi. Dalam lingkungan yang terbatas, perumusuan berarti berhentinya hubungan, pengunduran diri, atau menghindarkan diri dari terjadinya hubungan, karakteristik-karakteristik negatif berproses bersamaan dengan interaksi yang mengarah keperkelahian. Walaupun demikian tidak ada pertikaian yang mungkin bertahan tanpa dukungan dorongan psikologis, biarpun hal itu tumbuh secara berangsur-angsur.

Dalam hal konflik kepentingan, Simmel menyatakan bahwa ada kemungkinan konflik hanya menyangkut unsur-unsur tertentu diluar masalah-masalah pribadi. Kadangkala konflik itu menyangkut para pihak dalam aspek subjektifnya tanpa menyinggung kepentingan objektif yang sama. Pemisahan antara kepentingan objektif dengan persoalan pribadi, akan dapat meniadakan antipati pribadi. Akan tetapi hal itu pun mungkin mengakibatkan intensifikasi sikap bermusuhan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap bermusuhan memang bersumber pada aspek pribadi yang paling subjektif.

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan dan saran yang relevan dengan masalah penelitian. Kesimpulan yang dimaksud dapat dilihat pada penjelasan di bawah ini :

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada Bab terdahulu penulis menyimpulkan 2 aspek :

1. Konflik antar etnis yang terjadi di Makassar terdapat 2 aspek. Pertama Konflik individu yang berawal dari pertikaian individu antara warga Tionghoa dengan warga Makassar. Kedua, konflik kelompok muncul akibat menguatnya solidaritas kelompok sebagai akibat tekanan atau ancaman untuk membela diri dan terlibat konflik dengan lawan konflik. Munculnya konflik kelompok berawal dari konflik individu yang terjadi sebelumnya.
2. Faktor pemicu konflik antara etnis di Makassar ada 3 yakni, perbedaan ekonomi, etnis, dan budaya. Faktor yang dominan adalah etnis, sentimen etnis mudah mengalami konflik antara etnis Makassar dan Tionghoa di Makassar. Sedangkan agama berperan sebagai peredam konflik.
3. Pengelolaan konflik etnis menjadi konflik fungsional, dimana konflik tidak selamanya berarti negatif atau disasosiatif. Konflik bisa menjadi kekuatan pemersatu dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.

B. Saran

1. Perlu adanya pembauran dalam integrasi dan komunitas budaya yang baik, dengan melibatkan yakni pemerintah, etnik Tionghoa dan penduduk (etnik) Indonesia lainnya. Pemahaman tentang keindonesiaan di taraf penalaran-penalaran saja belumlah cukup. Demikian halnya dengan pemahaman tentang pembauran pun belum memadai. Kita masih perlu membumikan segenap konsep, harapan, cita dan wacana ini dalam ranah kenyataan tak kalah pentingnya, segenap komponen bangsa perlu memiliki niat suci dari lubuk yang paling dalam untuk menciptakan segenap cita yang menjadi idaman kita semua.
2. Kedua etnik, baik Tionghoa maupun etnik Makassar harus lebih sering berinteraksi, bergaul dan terlibat dalam beberapa acara bersama. Sebenarnya, dua etnik ini mau bekerja sama tapi kendalanya hanya pada prasangka dan stereotype yang masih melekat dan memang setiap individu memiliki hal itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel, *Kerangka Kerja Analisa Sistem Politik*, Jakarta, Bina Aksa, 1984.
- Lauer Robert, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003.
- Affandi Ikhwan Hakimul, *Akar Konflik Sepanjang Zaman*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Bahar, Safroedin dan Tangdililing, A.B, *Integrasi Nasional "Teori, Masalah dan Strategi"*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1996.
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Chang, William, *"Pertikaian Antar Etnis di Kalbar"*, Kompas, 2000.
- _____, *Konflik Komunal di Indonesia Saat ini*, Jakarta, INIS, 2003.
- Hardiman Budi. F, *Memahami Negativitas, Diskursus tentang Masa, Teror dan Trauma*. Jakarta, Kompas, 2005.
- Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Masalah-Masalah Pembangunan*, Jakarta, PT. Tempirit, 1984
- Maran, Rafael Raga, *Pengantar Sosial Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2001.
- Marbun, B.N, S.H., *Kamus Politik*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2005.
- Nasikun, *Sebuah Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*, Yogyakarta, Fakultas Sospol UGM, 1974.
- Plano, Jack C, E. Riggs Robert; Robin, Helena S. *Kamus Analisa Politik*; Jakarta, Rajawali Press, 1985.
- Rauf, Maswadi, *Konsensus dan Konflik Politik*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, 2001.
- Santoso, Slamet, *Dinamika Kelompok*, Jakarta, Bumi Aksa, 1999.
- Soerjono Soekanto, *Struktur Masyarakat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1987.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV. Alfabeta, 2005.
Singarimbun Masri dan Effendi Sofian, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta, LP3ES, 1986.

Suryadinata Leo, *Etnis Tionghoa dan Pembangunan Bangsa*, Jakarta, Pustaka LP3ES, 1999.

Tarmizi Taher, H, Dr, *Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia*, Jakarta, PPIM, 1997.

Tangdililing, *Jurnal Ilmu Politik 6*, Jakarta, Gramedia Pustaka Umum, 1990.

SUMBER LAIN:

- cs www.Fajar.co.id
- cs Makalah Gustiana Akambo
- cs www.google.com
- cs www.media-indonesia.co.id
- cs www.kompas.co.id
- cs www.tribuntimur.co.id

**KONFLIK ANTARA ETNIS TIONGHOA DENGAN MAKASSAR DITINJAU
DARI PENDEKATAN STRUKTURAL**



SKRIPSI

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin*

Oleh :

HASRIATI
E 111 02 006

UPT P...	
Tgl. W	4-6-2007
	Flsipol
	1 (Situ) des.
	H
	214

**JURUSAN POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2007**